



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap entitas baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk pembuatan laporan keuangan wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diharapkan adanya upaya harmonisasi berbagai peraturan di bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk keseragaman prosedur penerapan laporan keuangan baik yang manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan keuangan diperlukan suatu pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah.
9. Sistem adalah suatu susunan secara teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling bergantung pada prosedur-prosedur yang berhubungan yang melengkapi dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari suatu kegiatan organisasi yang penting.
10. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
21. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
29. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
30. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

32. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
33. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Sistem Pembukuan Tunggal (Single Entry) adalah suatu cara pembukuan yang ditandai oleh satu pembukuan saja untuk setiap transaksi pada salah satu perkiraan buku besar.
36. Sistem Pembukuan berpasangan (Double Entry) adalah suatu metode akuntansi yang mengakui dualitas dari suatu transaksi (sumber dan penempatan) sedemikian rupa sehingga perubahan dalam suatu rekening secara otomatis akan menyebabkan perubahan yang seimbang dalam rekening atau rekening-rekening lainnya.
37. Periode Akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
38. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
39. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
40. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
41. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.
42. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain termasuk pengeluaran untuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
43. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
44. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

45. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau b berdasarkan sebab lainnya yang sah.
46. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
47. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
48. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
49. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
50. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
51. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
52. Neraca saldo adalah angka-angka saldo dari semua akun buku besar sesuai dengan posisi debit atau kredit masing-masing akun.
53. Aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang rupiah, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

54. Aset lancar adalah kekayaan atau sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
55. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang dapat dipergunakan setiap saat.
56. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
57. Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo rekening giro yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah, saldo kas di kas daerah pada Neraca adalah saldo rekening koran per 31 Desember tahun anggaran bersangkutan.
58. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang dapat digunakan untuk pembayaran keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan bukti pengeluaran (SPJ). Terhadap sisa UYHD harus disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
59. Saldo kas di bendahara pengeluaran pada neraca adalah saldo atau sisa kas yang ada di Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran bersangkutan belum disetor ke Kas Daerah.
60. Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas pada Bendahara Penerimaan yang merupakan penerimaan berdasarkan surat tanda setoran bagi Unit Kerja yang menangani pendapatan dan harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah diterima, kecuali ada ketentuan lain.
61. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada neraca adalah saldo yang masih terdapat pada bendahara penerimaan yang sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran bersangkutan belum disetor ke Kas Daerah.
62. Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
63. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah yang berasal dari sisa pengadaan barang habis pakai tahun anggaran sebelumnya yang akan habis digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dan atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

64. Investasi jangka pendek adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi.
65. Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
66. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
67. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
68. Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
69. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
70. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
71. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
72. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban.
73. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode akuntansi, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
74. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi silang antara Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas pada SKPKD dan informasi silang antara Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK pada SKPD.
75. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan konsolidasi.
76. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan pengelolaan keuangan daerah untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah bertujuan menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan untuk SKPD meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan untuk SKPKD meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Adapun sasaran dari ditetapkannya Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah ini adalah:

- a. tercapainya kesamaan pengertian, penafsiran, bentuk dan format penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. meminimalisasi salah tafsir dan tumpang tindih dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- c. mewujudkan keterpaduan dan keseragaman bentuk dan format laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. tercapainya dayaguna dan hasilguna penyusunan laporan keuangan sebagai bahan informasi pelaksanaan kinerja suatu entitas yang berhubungan dengan Anggaran/Keuangan Daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik dari segi

manajerial maupun organisatoris untuk perbaikan kinerja suatu entitas di masa yang akan datang.

BAB III

SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi program.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan kedalam bentuk buku jurnal, buku besar serta kertas kerja (worksheet) sehingga menjadi laporan keuangan dan apabila diperlukan dapat ditambah dengan buku besar pembantu.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi pada SKPKD dan pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada SKPD.
- (4) Muatan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yakni kode rekening terdiri atas kode rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Buku Jurnal dan Buku Besar/Buku Besar Pembantu yang digunakan dalam melakukan pencatatan baik untuk Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.
- (5) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/ barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.
- (6) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai pedoman untuk melaksanakan pencatatan, tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Buku Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas dan Buku Jurnal Umum sebagai pedoman untuk melaksanakan pencatatan tercantum pada Lampiran II.A, Lampiran II.B dan Lampiran II.C Peraturan Bupati ini.
- (8) Buku Besar dan Buku Besar Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai pedoman untuk melaksanakan

pencatatan, tercantum pada Lampiran III.A dan Lampiran III.B Peraturan Bupati ini.

- (9) Laporan Keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebagai laporan tengah tahunan dan laporan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (10) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada Lampiran IV.A dan Lampiran IV.B Peraturan Bupati ini.
- (11) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada Lampiran V.A, Lampiran V.B, Lampiran V.C dan Lampiran V.D Peraturan Bupati ini.
- (12) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada Lampiran VI.A, Lampiran VI.B dan Lampiran VI.C Peraturan Bupati ini.
- (13) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada Lampiran VII .A dan Lampiran VII. B Peraturan Bupati ini.
- (14) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas sebagai pedoman untuk menyusun laporan, tercantum pada Lampiran VIII.A dan Lampiran VIII.B Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan peraturan tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini sebagai entitas pelaporan menyusun laporan pertanggungjawaban APBD.
 - (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - (3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - (4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD dan disampaikan kepada Bupati setelah diaudit oleh Pemeriksa Eksternal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS

Bagian Kesatu

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Pasal 6

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Pasal 7

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sedangkan pada tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi.

Bagian Ketiga

Dokumen Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Pasal 8

Dokumen yang digunakan pada Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD dan/atau SKPKD, terdiri atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi;
- c. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan pada SKPD untuk menyetero penerimaan daerah atau PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada SKPD;
- d. Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah;
- e. Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah;
- f. Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas;
- g. Buku Besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat peringkasan (posting) semua transaksi atau kejadian selain kas dari Jurnal Penerimaan Kas ke dalam Buku Besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Buku Besar Pembantu merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi dan kejadian yang berisi rincian akun buku besar. Buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan sebagai kelengkapan informasi terhadap akun tertentu yang dianggap perlu.

Bagian Keempat

Laporan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Pasal 9

- (1) Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD secara bersama-sama dengan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Aset dan Prosedur Akuntansi Selain Kas menghasilkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD secara bersama-sama dengan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Aset dan Prosedur Akuntansi Selain Kas menghasilkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bagian Kelima

Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Pasal 10

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi program.

Pasal 11

- (1) Bukti Transaksi yang digunakan pada prosedur Akuntansi Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup :
 - a. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
 - b. STS (Surat Tanda Setoran);
 - c. Bukti Transfer; dan
 - d. Nota kredit bank, merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang mauk ke rekening kas daerah;
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah); dan/atau
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah; dan/atau
 - c. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya;

- (3) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
- a. Buku Jurnal;
 - b. Buku Besar;
 - c. Buku Besar Pembantu (Jika diperlu

Pasal 12

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 13

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening yang berlawanan dengan asal penerimaan kas rekening berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan diposting (dipindahkan) kedalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

BAB V

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

Bagian Kesatu

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Pasal 14

- (1) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.
- (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas langsung (SP2D LS); dan

- b. Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan (SP2D UP/GU/TU).

Bagian Kedua

Pelaksana Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Pasal 15

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sedangkan pada tingkat SKPKD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Fungsi Akuntansi.

Bagian Ketiga

Dokumen Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Pasal 16

Dokumen yang digunakan pada Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD dan/atau SKPKD, terdiri atas:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh PPKD sebagai dokumen yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD;
- c. Kuitansi Pembayaran dan Bukti Penerimaan Lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran;
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk;
- e. Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah;
- f. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah;
- g. Buku Jurnal Pengeluaran Kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas;

- h. Buku Besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat peringkasan (posting) semua transaksi atau kejadian selain kas dari Jurnal Pengeluaran Kas kedalam buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Buku Besar Pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi dan/atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar. Buku Besar Pembantu sebagai alat uji silang dan sebagai kelengkapan informasi terhadap akun tertentu yang dianggap perlu.

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ Administratif) beserta lampirannya kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) beserta Register Penutupan Kas dan lampiran lainnya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban bulan Desember dan Bukti Setoran uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) PPK-SKPD melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum pengeluaran kas (berdasarkan SP2D UP/GU/TU, SP2D LS) yang telah disahkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (6) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Bagian Keempat

Laporan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Pasal 18

- (1) Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD secara bersama-sama dengan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Aset dan Prosedur Akuntansi Selain Kas menghasilkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD secara bersama-sama dengan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Aset dan Prosedur Akuntansi Selain Kas menghasilkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

BAB VI

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS

Bagian Kesatu

Prosedur Akuntansi Selain Kas

Pasal 19

- (1) Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas pada SKPD dan/atau pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

- (2) Prosedur Akuntansi Selain Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran yang merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan;

 - b. koreksi kesalahan pencatatan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah diposting ke buku besar;

 - c. penerimaan/pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD, yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah;

- d. pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang/aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang;
 - e. retur pembelian kredit merupakan pengembalian barang/aset tetap yang telah dibeli secara kredit;
 - f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas;
 - g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (*ruislaag*) dengan pihak ketiga.
- (3) Pertanggungjawaban pengeluaran yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan (UP/GU/TU) dan pencatatan oleh PPK-SKPD adalah realisasi belanja di SKPD menggunakan pengesahan SPJ (pengesahan SPJ bulanan atau laporan SPJ Administratif dan SPJ Fungsional atas penggunaan dana UP/GU/TU.
- (4) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan dengan angsuran di masa yang akan datang.
- (5) Retur (pengembalian) pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
- (6) Pemindahtanganan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap kepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- (7) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (*ruislaag*) dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Pelaksana Prosedur Akuntansi Selain Kas

Pasal 20

Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sedangkan pada tingkat SKPKD

dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Fungsi Akuntansi.

Bagian Ketiga

Dokumen Prosedur Akuntansi Selain Kas

Pasal 21

Dokumen yang digunakan pada Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD dan/atau SKPKD, terdiri dari:

- a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. berita acara penerimaan barang;
- c. surat keputusan penghapusan barang;
- d. surat pengiriman barang;
- e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
- f. berita acara pemusnahan barang;
- g. berita acara serah terima barang;
- h. berita acara penilaian;
- i. bukti memorial merupakan dokumen untuk mencatat transaksi atau kejadian selain kas sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum;
- j. buku jurnal umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak dicatat dalam Jurnal Penerimaan Kas maupun Jurnal Pengeluaran Kas;
- k. buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat peringkasan (posting) semua transaksi atau kejadian selain kas dari Jurnal Umum kedalam buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- l. buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi dan/atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar. Buku Besar Pembantu sebagai alat uji silang dan sebagai kelengkapan informasi terhadap akun tertentu yang dianggap perlu.

Bagian Keempat

Laporan Prosedur Akuntansi Selain Kas

Pasal 22

- (1) Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD secara bersama-sama dengan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas dan Prosedur Akuntansi Aset menghasilkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD secara bersama-sama dengan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas dan Prosedur Akuntansi Aset menghasilkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bagian Kelima

Uraian Prosedur Akuntansi Selain Kas

Pasal 23

- (1) Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi.

- (2) Bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas mencakup antara lain:
 - a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
 - b. berita acara penerimaan barang;
 - c. surat keputusan penghapusan barang;
 - d. surat pengiriman barang;
 - e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
 - f. berita acara pemusnahan barang;
 - g. berita acara serah terima barang;
 - h. berita acara penilaian.

- (3) Transaksi kejadian selain kas, terdiri dari:
 - a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
 - b. koreksi kesalahan pencatatan;
 - c. penerimaan donasi selain kas;
 - d. pembelian secara kredit;

- e. retur pembelian kredit;
 - f. pelepasan hak atas aset tetap tanpa konsekuensi kas;
 - g. penerimaan aset tanpa konsekuensi kas.
- (4) Berdasarkan bukti transaksi PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi mencatat ke dalam Buku Jurnal Umum.
- (5) PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi secara periodik atau berkala melakukan *posting* ke Buku Besar.
- (6) Jika dianggap perlu PPK-SKPD dan/atau PPKD-Fungsi Akuntansi dapat membuat Buku Besar Pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar.

Bagian Keenam

Prosedur Akuntansi Aset

Pasal 24

- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD/SKPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD/SKPKD.
- (2) Batas nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material sama atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
- a. peralatan dan mesin, terdiri dari alat-alat berat nilai kapitalisasi minimal sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. gedung dan Bangunan, nilai kapitalisasi minimal Rp. 25.000.000,-
 - c. Jalan, irigasi dan jaringan, nilai kapitalisasi minimal Rp.20.000.000,-
- (3) Rehabilitasi yang bersifat sedang, berat, dan tidak rutin dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat dan dianggarkan dibelanja modal.
- (4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

Pasal 25

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilampiri dengan :

- a. Berita Acara Penerimaan Barang;
- b. Berita Acara Serah Terima Barang; dan

- c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 26

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) mencakup :

- a. Buku jurnal umum/korolari;
- b. Buku Besar;
- c. Buku Besar Pembantu (jika diperlukan).

Pasal 27

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD dan fungsi akuntansi SKPKD serta pengurus barang dan penyimpan barang SKPD/SKPKD.

Pasal 28

- (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran

pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

- (3) Pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 30

PPKD menyusun laporan semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama APBD dengan disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 31

Laporan semester pertama APBD beserta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lama minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan semester pertama APBD.

Pasal 32

Laporan semester pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disampaikan kepada DPRD paling lama akhir bulan juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan SKPD dan PPKD

Pasal 33

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu.

Pasal 34

- (1) Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang memadai serta Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintahan yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan Ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

- (5) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab SKPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Tabel jadwal pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tahapan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemda serta Versi Laporan berdasarkan Permendagri 13 dan SAP sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 27 Juni 2012

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,
TTD

Ir. H. Muhammad Sukri
Pembina Utama Muda
NIP. 195909221989031004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2012 NOMOR 305

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 Nomor 25 Tahun 2012
 TENTANG
 SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU**

KODE REKENING NERACA

A. ASET

KODE REKENING ASET

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 1 | | | | | ASET |
| 1 | 1 | | | | ASET LANCAR |
| 1 | 1 | 1 | | | Kas |
| 1 | 1 | 1 | 01 | | Kas di Kas Daerah |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Kas di Kas Daerah |
| 1 | 1 | 1 | 02 | | Kas di Bendahara Penerimaan |
| 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | Kas di Bendahara Penerimaan |
| 1 | 1 | 1 | 03 | | Kas di Bendahara Pengeluaran |
| 1 | 1 | 1 | 03 | 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran |
| 1 | 1 | 2 | | | Investasi Jangka Pendek |
| 1 | 1 | 2 | 01 | | Investasi dalam Saham |
| 1 | 1 | 2 | 01 | 01 | Investasi dalam Saham |
| 1 | 1 | 2 | 01 | 02 | Dst. |
| 1 | 1 | 2 | 02 | | Investasi dalam Obligasi |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 01 | Investasi dalam Obligasi..... |
| 1 | 1 | 2 | 02 | 02 | Dst..... |
| 1 | 1 | 3 | | | Piutang |
| 1 | 1 | 3 | 01 | | Piutang Pajak |
| 1 | 1 | 3 | 01 | 01 | Piutang Pajak..... |
| 1 | 1 | 3 | 01 | 02 | Dst. |
| 1 | 1 | 3 | 02 | | Piutang Retribusi |
| 1 | 1 | 3 | 02 | 01 | Piutang Retribusi..... |
| 1 | 1 | 3 | 02 | 02 | Dst. |
| 1 | 1 | 3 | 03 | | Piutang Dana Bagi Hasil |
| 1 | 1 | 3 | 03 | 01 | Piutang Dana Bagi Hasil Pajak |
| 1 | 1 | 3 | 03 | 02 | Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak |
| 1 | 1 | 3 | 03 | 03 | Dst. |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|--------|---|
| | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 04 | | Piutang Dana Alokasi Umum |
| 1 | 1 | 3 | 04 | 01 | Piutang Dana Alokasi Umum..... |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 05 | | Piutang Dana Alokasi Khusus |
| 1 | 1 | 3 | 05 | 01 | Piutang Dana Alokasi Khusus..... |
| 1 | 1 | 3 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | | Piutang Lain-lain |
| 1 | 1 | 4 | 01 | | Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran |
| 1 | 1 | 4 | 01 | 01 | Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor |
| 1 | 1 | 4 | 01 | 02 | Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah |
| 1 | 1 | 4 | 01 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 02 | | Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah |
| 1 | 1 | 4 | 02 | 01 | Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah..... |
| 1 | 1 | 4 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 03 | | Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah |
| 1 | 1 | 4 | 03 | 01 | Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah..... |
| 1 | 1 | 4 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 04 | | Piutang Deviden |
| 1 | 1 | 4 | 04 | 01 | Piutang Deviden..... |
| 1 | 1 | 4 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 05 | | Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah |
| 1 | 1 | 4 | 05 | 01 | Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah..... |
| 1 | 1 | 4 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 06 | | Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum |
| 1 | 1 | 4 | 06 | 01 | Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum..... |
| 1 | 1 | 4 | 06 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | | | Persediaan |
| 1 | 1 | 5 | 01 | | Persediaan Alat Tulis Kantor |
| 1 | 1 | 5 | 01 | 01 | Persediaan Alat Tulis Kantor..... |
| 1 | 1 | 5 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 02 | | Persediaan Alat Listrik |
| 1 | 1 | 5 | 02 | 01 | Persediaan Alat Listrik..... |
| 1 | 1 | 5 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| KODE REKENING | | | | URAIAN | |
| 1 | | | | 2 | |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 03 | | Persediaan Material/Bahan |
| 1 | 1 | 5 | 03 | 01 | Persediaan Bahan Baku Bangunan |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | 1 | 5 | 03 | 02 | Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas |
| 1 | 1 | 5 | 03 | 03 | Persediaan Bahan/Bibit Tanaman |
| 1 | 1 | 5 | 03 | 04 | Persediaan Bibit Ternak |
| 1 | 1 | 5 | 03 | 05 | Persediaan Obat-obatan |
| 1 | 1 | 5 | 03 | 06 | Persediaan Bahan Kimia |
| 1 | 1 | 5 | 03 | 07 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 04 | | Persediaan Benda Pos |
| 1 | 1 | 5 | 04 | 01 | Persediaan Perangko |
| 1 | 1 | 5 | 04 | 02 | Persediaan Materai |
| 1 | 1 | 5 | 04 | 03 | Persediaan Kertas Segel |
| 1 | 1 | 5 | 04 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 05 | | Persediaan Bahan Bakar |
| 1 | 1 | 5 | 05 | 01 | Persediaan Bahan Bakar Minyak |
| 1 | 1 | 5 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | 06 | | Persediaan Bahan Makanan Pokok |
| 1 | 1 | 5 | 06 | 01 | Persediaan Bahan Makanan Pokok |
| 1 | 1 | 5 | 06 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 2 | | | | INVESTASI JANGKA PANJANG |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | Investasi Non Permanen |
| 1 | 2 | 1 | 01 | | Pinjaman kepada Perusahaan Negara |
| 1 | 2 | 1 | 01 | 01 | Pinjaman kepada Perusahaan Negara..... |
| 1 | 2 | 1 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 02 | | Pinjaman kepada Perusahaan Daerah |
| 1 | 2 | 1 | 02 | 01 | Pinjaman kepada Perusahaan Daerah..... |
| 1 | 2 | 1 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 03 | | Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya |
| 1 | 2 | 1 | 03 | 01 | Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya..... |
| 1 | 2 | 1 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 04 | | Investasi dalam Surat Utang Negara |
| 1 | 2 | 1 | 04 | 01 | Investasi dalam Surat Utang Negara..... |
| 1 | 2 | 1 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 05 | | Investasi Non Permanen Lainnya |
| 1 | 2 | 1 | 05 | 01 | Investasi Non Permanen Lainnya..... |
| 1 | 2 | 1 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | Investasi Permanen |
| 1 | 2 | 2 | 01 | | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah |
| 1 | 2 | 2 | 01 | 01 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah..... |
| 1 | 2 | 2 | 01 | 02 | Dst. |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | 2 | 2 | 02 | | Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan |
| 1 | 2 | 2 | 02 | 01 | Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan..... |
| 1 | 2 | 2 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 03 | | Penyertaan Modal Perusahaan Patungan |
| 1 | 2 | 2 | 03 | 01 | Penyertaan Modal Perusahaan Patungan..... |
| 1 | 2 | 2 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 04 | | Investasi Permanen Lainnya |
| 1 | 2 | 2 | 04 | 01 | Investasi Permanen Lainnya |
| 1 | 2 | 2 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | | | | ASET TETAP |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | Tanah |
| 1 | 3 | 1 | 01 | | Tanah Kantor |
| 1 | 3 | 1 | 01 | 01 | Tanah Kantor..... |
| 1 | 3 | 1 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 02 | | Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 01 | Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit..... |
| 1 | 3 | 1 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 03 | | Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas |
| 1 | 3 | 1 | 03 | 01 | Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas..... |
| 1 | 3 | 1 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 04 | | Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik |
| 1 | 3 | 1 | 04 | 01 | Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik..... |
| 1 | 3 | 1 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 05 | | Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak |
| 1 | 3 | 1 | 05 | 01 | Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak..... |
| 1 | 3 | 1 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 06 | | Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar |
| 1 | 3 | 1 | 06 | 01 | Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar..... |
| 1 | 3 | 1 | 06 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 07 | | Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan |
| 1 | 3 | 1 | 07 | 01 | Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan |
| 1 | 3 | 1 | 07 | 02 | Dst. |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|--------|--|
| 1 | 3 | 1 | 08 | | Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan |
| 1 | 3 | 1 | 08 | 01 | Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan |
| 1 | 3 | 1 | 08 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 09 | | Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus |
| 1 | 3 | 1 | 09 | 01 | Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa..... |
| 1 | 3 | 1 | 09 | 02 | Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus |
| 1 | 3 | 1 | 09 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 10 | | Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus |
| 1 | 3 | 1 | 10 | 01 | Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan |
| 1 | 3 | 1 | 10 | 02 | Tanah Sarana Pendidikan Kursus |
| 1 | 3 | 1 | 10 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 11 | | Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan |
| 1 | 3 | 1 | 11 | 01 | Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan..... |
| 1 | 3 | 1 | 11 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 12 | | Tanah Sarana Sosial Panti Jompo |
| 1 | 3 | 1 | 12 | 01 | Tanah Sarana Sosial Panti Jompo |
| 1 | 3 | 1 | 12 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 13 | | Tanah Sarana Umum Terminal |
| 1 | 3 | 1 | 13 | 01 | Tanah Sarana Umum Terminal |
| 1 | 3 | 1 | 13 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 14 | | Tanah Sarana Umum Dermaga |
| 1 | 3 | 1 | 14 | 01 | Tanah Sarana Umum Dermaga |
| 1 | 3 | 1 | 14 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| KODE REKENING | | | | URAIAN | |
| 1 | | | | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 15 | | Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis |
| 1 | 3 | 1 | 15 | 01 | Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis..... |
| 1 | 3 | 1 | 15 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 16 | | Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan |
| 1 | 3 | 1 | 16 | 01 | Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan |
| 1 | 3 | 1 | 16 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 17 | | Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan |
| 1 | 3 | 1 | 17 | 01 | Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan |
| 1 | 3 | 1 | 17 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 18 | | Tanah Sarana Umum Pasar |
| 1 | 3 | 1 | 18 | 01 | Tanah Sarana Umum Pasar |
| 1 | 3 | 1 | 18 | 02 | Dst. |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|--------|---|
| 1 | 3 | 1 | 19 | | Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah |
| 1 | 3 | 1 | 19 | 01 | Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah |
| 1 | 3 | 1 | 19 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 20 | | Tanah Sarana Umum Taman |
| 1 | 3 | 1 | 20 | 01 | Tanah Sarana Umum Taman |
| 1 | 3 | 1 | 20 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 21 | | Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat |
| 1 | 3 | 1 | 21 | 01 | Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat |
| 1 | 3 | 1 | 21 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 22 | | Tanah Sarana Umum Ibadah |
| 1 | 3 | 1 | 22 | 01 | Tanah Sarana Umum Ibadah |
| 1 | 3 | 1 | 22 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 23 | | Tanah Sarana Stadion Olahraga |
| 1 | 3 | 1 | 23 | 01 | Tanah Sarana Stadion Olahraga |
| 1 | 3 | 1 | 23 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 24 | | Tanah Perumahan |
| 1 | 3 | 1 | 24 | 01 | Tanah Perumahan |
| 1 | 3 | 1 | 24 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 25 | | Tanah Pertanian |
| 1 | 3 | 1 | 25 | 01 | Tanah Pertanian |
| 1 | 3 | 1 | 25 | 02 | Dst. |
| KODE REKENING | | | | URAIAN | |
| 1 | | | | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 26 | | Tanah Perkebunan |
| 1 | 3 | 1 | 26 | 01 | Tanah Perkebunan |
| 1 | 3 | 1 | 26 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 27 | | Tanah Perikanan |
| 1 | 3 | 1 | 27 | 01 | Tanah Perikanan |
| 1 | 3 | 1 | 27 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 28 | | Tanah Peternakan |
| 1 | 3 | 1 | 28 | 01 | Tanah Peternakan |
| 1 | 3 | 1 | 28 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 29 | | Tanah Perkampungan |
| 1 | 3 | 1 | 29 | 01 | Tanah Perkampungan |
| 1 | 3 | 1 | 29 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 30 | | Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku |
| 1 | 3 | 1 | 30 | 01 | Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|--------|---|
| 1 | 3 | 1 | 30 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | Peralatan dan Mesin |
| 1 | 3 | 2 | 01 | | Alat-alat Berat |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 01 | Traktor |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 02 | Buldozer |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | Stoom wals |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | Eskavator |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 05 | Dump truk |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 06 | Crane |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 07 | Kendaraan penyapu jalan |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 08 | Mesin pengolah semen |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 09 | Mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis) |
| 1 | 3 | 2 | 01 | 10 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 02 | | Alat-alat Angkutan Darat Bermotor |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 01 | Alat-alat angkutan darat bermotor sedan |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 02 | Alat-alat angkutan darat bermotor jeep |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 04 | Alat-alat angkutan darat bermotor bus |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 05 | Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 06 | Alat-alat angkutan darat bermotor truck |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 07 | Alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 08 | Alat-alat angkutan darat bermotor boks |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 09 | Alat-alat angkutan darat bermotor pick up |
| KODE REKENING | | | | URAIAN | |
| 1 | | | | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 10 | Alat-alat angkutan darat bermotor ambulans |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 11 | Alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 12 | Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 13 | Alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 14 | Alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan |
| 1 | 3 | 2 | 02 | 15 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 03 | | Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor |
| 1 | 3 | 2 | 03 | 01 | Gerobak |
| 1 | 3 | 2 | 03 | 02 | Pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong |
| 1 | 3 | 2 | 03 | 03 | Becak |
| 1 | 3 | 2 | 03 | 04 | Sepeda |
| 1 | 3 | 2 | 03 | 05 | Karavan |
| 1 | 3 | 2 | 03 | 05 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 04 | | Alat-alat Angkutan di Air Bermotor |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 01 | Kapal motor |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 02 | Kapal feri |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 03 | Speed boat |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 04 | Motor boat/motor tempel |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 05 | Hydro foil |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 06 | Jet foil |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | 3 | 2 | 04 | 07 | Kapal tug boat |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 08 | Kapal tanker |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 09 | Kapal kargo |
| 1 | 3 | 2 | 04 | 10 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 05 | | Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor |
| 1 | 3 | 2 | 05 | 01 | Perahu layer |
| 1 | 3 | 2 | 05 | 02 | Perahu sampan |
| 1 | 3 | 2 | 05 | 03 | Perahu tongkang |
| 1 | 3 | 2 | 05 | 04 | Perahu karet |
| 1 | 3 | 2 | 05 | 05 | Perahu rakit |
| 1 | 3 | 2 | 05 | 06 | Perahu sekoci |
| 1 | 3 | 2 | 05 | 07 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 06 | | Alat-alat Angkutan Udara |
| 1 | 3 | 2 | 06 | 01 | Pesawat kargo |
| 1 | 3 | 2 | 06 | 02 | Pesawat penumpang |
| 1 | 3 | 2 | 06 | 03 | Pesawat helikopter |
| 1 | 3 | 2 | 06 | 04 | Pesawat pemadam kebakaran |
| 1 | 3 | 2 | 06 | 05 | Pesawat capung |
| 1 | 3 | 2 | 06 | 06 | Pesawat terbang ampibi |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | 07 | Pesawat terbang layang |
| 1 | 3 | 2 | 06 | 08 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 07 | | Alat-alat Bengkel |
| 1 | 3 | 2 | 07 | 01 | Mesin las |
| 1 | 3 | 2 | 07 | 02 | Mesin bubut |
| 1 | 3 | 2 | 07 | 03 | Mesin dongkrak |
| 1 | 3 | 2 | 07 | 04 | Mesin kompresor |
| 1 | 3 | 2 | 07 | 05 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 08 | | Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan |
| 1 | 3 | 2 | 08 | 01 | Penggiling hasil pertanian |
| 1 | 3 | 2 | 08 | 02 | Alat pengering gabah |
| 1 | 3 | 2 | 08 | 03 | Mesin bajak |
| 1 | 3 | 2 | 08 | 04 | Alat penetas |
| 1 | 3 | 2 | 08 | 05 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 09 | | Peralatan kantor |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 01 | Mesin tik |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 02 | Mesin hitung |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 03 | Mesin stensil |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 04 | Mesin fotocopy |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 05 | Mesin cetak |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 06 | Mesin jilid |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 07 | Mesin potong kertas |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 08 | Mesin penghancur kertas |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 09 | Papan tulis elektronik |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 10 | Papan visual elektronik |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | 3 | 2 | 09 | 11 | Tabung pemadam kebakaran |
| 1 | 3 | 2 | 09 | 12 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 10 | | Perlengkapan Kantor |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 01 | Meja gambar |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 02 | Almari |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 03 | Brankas |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 04 | Filling kabinet |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 05 | White board |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 06 | Penunjuk waktu |
| 1 | 3 | 2 | 10 | 07 | Dst. (Air Condition/AC) |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 11 | | Komputer |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 01 | Komputer mainframe/server |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 02 | Komputer/PC |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 03 | Komputer note book |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 04 | Printer |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 05 | Scaner |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 06 | Monitor/display |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 07 | CPU |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 08 | UPS/Stabilizer |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 09 | Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | Peralatan jaringan komputer |
| 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 12 | | Meubelair |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 01 | Meja kerja |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 02 | Meja rapat |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 03 | Meja makan |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 04 | Kursi kerja |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 05 | Kursi rapat |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 06 | Kursi makan |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 07 | Tempat tidur |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 08 | Sofa |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 09 | Rak buku/tv/kembang |
| 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 13 | | Peralatan Dapur |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 01 | Tabung gas |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 02 | Kompore gas |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 03 | Lemari makan |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 04 | Dispenser |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 05 | Kulkas |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 06 | Rak piring |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 07 | Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 08 | Dst. ... |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|--------|---|
| 1 | 3 | 2 | 14 | | Penghias Ruangan Rumah Tangga |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 01 | Lampu hias |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 02 | Jam dinding/meja |
| 1 | 3 | 2 | 14 | 03 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | | Alat-alat Studio |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 01 | Kamera |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 02 | Handycam |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 03 | Proyektor |
| 1 | 3 | 2 | 15 | 04 | Dst. ... |
| KODE REKENING | | | | URAIAN | |
| 1 | | | | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | 16 | | Alat-alat Komunikasi |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 01 | Telepon |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 02 | Faximili |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 03 | Radio ssb |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 04 | Radio HF/FM (handy talkie) |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 05 | Radio VHF |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 06 | Radio UHF |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 07 | Alat sandi |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 08 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 17 | | Alat-alat Ukur |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 01 | Timbangan |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 02 | Teodolite |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 03 | Alat uji emisi |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 04 | Alat GPS |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 05 | Kompas/peralatan navigasi |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 06 | Bejana ukur |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 07 | Barometer |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 08 | Seismograph |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 09 | Ultrasonograph |
| 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 18 | | Alat-alat Kedokteran |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 01 | Alat-alat kedokteran umum |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 02 | Alat-alat kedokteran gigi |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 03 | Alat-alat kedokteran tht |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 04 | Alat-alat kedokteran mata |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 05 | Alat-alat kedokteran bedah |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 06 | Alat-alat kedokteran anak |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 07 | Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 08 | Alat-alat kedokteran kulit dan kelamin |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 09 | Alat-alat kedokteran kardiologi |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 10 | Alat-alat kedokteran neurologi |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 11 | Alat-alat kedokteran orthopedi |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 12 | Alat-alat kedokteran hewan |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 13 | Alat-alat farmasi |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 14 | Alat-alat penyakit dalam/internis |
| 1 | 3 | 2 | 18 | 15 | Dst. ... |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | 3 | 2 | 19 | | Alat-alat Laboratorium |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 01 | Alat-alat laboratorium biologi |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 02 | Alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 03 | Alat-alat laboratorium kimia |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 04 | Alat-alat laboratorium pertanian |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 05 | Alat-alat laboratorium peternakan |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 06 | Alat-alat laboratorium perkebunan |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 07 | Alat-alat laboratorium perikanan |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 08 | Alat-alat laboratorium bahasa |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 09 | Alat-alat peraga / praktik sekolah |
| 1 | 3 | 2 | 19 | 10 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 20 | | Alat-alat Persenjataan/Keamanan |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 01 | Senjata api |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 02 | Mobil water canon |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 03 | Borgol |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 04 | Sangkur/bayonet |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 05 | Perisai/tameng |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 06 | Detektor logam |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 07 | Rompi anti peluru |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 08 | Pentungan |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 09 | Helm |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 10 | Alarm/sirene |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 11 | Sentolop/senter |
| 1 | 3 | 2 | 20 | 12 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | | | Gedung dan Bangunan |
| 1 | 3 | 3 | 01 | | Gedung kantor |
| 1 | 3 | 3 | 01 | 01 | Gedung kantor.... |
| 1 | 3 | 3 | 01 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | 02 | | Gedung rumah jabatan |
| 1 | 3 | 3 | 02 | 01 | Gedung rumah jabatan |
| 1 | 3 | 3 | 02 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | 03 | | Gedung rumah dinas |
| 1 | 3 | 3 | 03 | 01 | Gedung rumah dinas |
| 1 | 3 | 3 | 03 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | 04 | | Gedung gudang |
| 1 | 3 | 3 | 04 | 01 | Gedung gudang |
| 1 | 3 | 3 | 04 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | 05 | | Bangunan bersejarah |
| 1 | 3 | 3 | 05 | 01 | Bangunan bersejarah |
| 1 | 3 | 3 | 05 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| KODE | | | | | URAIAN |

| REKENING | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 06 | | Bangunan monumen |
| 1 | 3 | 3 | 06 | 01 | Bangunan monumen |
| 1 | 3 | 3 | 06 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | 07 | | Tugu peringatan |
| 1 | 3 | 3 | 07 | 01 | Tugu peringatan |
| 1 | 3 | 3 | 07 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | | | Jalan, Jaringan dan Instalasi |
| 1 | 3 | 4 | 01 | | Jalan |
| 1 | 3 | 4 | 01 | 01 | Jalan |
| 1 | 3 | 4 | 01 | 02 | Jalan fly over |
| 1 | 3 | 4 | 01 | 03 | Jalan under pass |
| 1 | 3 | 4 | 01 | 04 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 02 | | Jembatan |
| 1 | 3 | 4 | 02 | 01 | Jembatan gantung |
| 1 | 3 | 4 | 02 | 02 | Jembatan ponton |
| 1 | 3 | 4 | 02 | 03 | Jembatan penyeberangan orang |
| 1 | 3 | 4 | 02 | 04 | Jembatan penyeberangan di atas air |
| 1 | 3 | 4 | 02 | 05 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 03 | | Jaringan Air |
| 1 | 3 | 4 | 03 | 01 | Jaringan Irigasi/waduk/bendungan |
| 1 | 3 | 4 | 03 | 02 | Jaringan air bersih/air minum |
| 1 | 3 | 4 | 03 | 03 | Reservoir |
| 1 | 3 | 4 | 03 | 04 | Pintu air |
| 1 | 3 | 4 | 03 | 05 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 04 | | Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota |
| 1 | 3 | 4 | 04 | 01 | Lampu hias jalan |
| 1 | 3 | 4 | 04 | 02 | Lampu hias taman |
| 1 | 3 | 4 | 04 | 03 | Lampu penerang hutan kota |
| 1 | 3 | 4 | 04 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 05 | | Instalasi Listrik dan Telepon |
| 1 | 3 | 4 | 05 | 01 | Instalasi listrik |
| 1 | 3 | 4 | 05 | 02 | Jaringan telepon |
| 1 | 3 | 4 | 05 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 3 | 5 | | | Aset Tetap Lainnya |
| 1 | 3 | 5 | 01 | | Buku dan Kepustakaan |
| 1 | 3 | 5 | 01 | 01 | Buku matematika |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| 1 | 3 | 5 | 01 | 02 | Buku fisika |
| 1 | 3 | 5 | 01 | 03 | Buku kimia |
| 1 | 3 | 5 | 01 | 04 | Buku biologi |
| 1 | 3 | 5 | 01 | 05 | Buku biografi |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | 4 | 1 | 01 | | Dana Cadangan |
| 1 | 4 | 1 | 01 | 01 | Dana Cadangan |
| 1 | 4 | 1 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 5 | | | | ASET LAINNYA |
| 1 | 5 | 1 | | | Tagihan Piutang Penjualan Angsuran |
| 1 | 5 | 1 | 01 | | Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor |
| 1 | 5 | 1 | 01 | 01 | Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor |
| 1 | 5 | 1 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 02 | | Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah |
| 1 | 5 | 1 | 02 | 01 | Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah |
| 1 | 5 | 1 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | | | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |
| 1 | 5 | 2 | 01 | | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |
| 1 | 5 | 2 | 01 | 01 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |
| 1 | 5 | 2 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | | | Kemitraan dengan Pihak Ketiga |
| 1 | 5 | 3 | 01 | | Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT) |
| 1 | 5 | 3 | 01 | 01 | Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT).... |
| 1 | 5 | 3 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | 02 | | Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate /BTO) |
| 1 | 5 | 3 | 02 | 01 | Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate /BTO).... |
| 1 | 5 | 3 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 5 | 3 | 03 | | Kerjasama Operasi (KSO) |
| 1 | 5 | 3 | 03 | 01 | Kerjasama Operasi (KSO) |
| 1 | 5 | 3 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| 1 | 5 | 4 | | | Aset Tidak Berwujud |
| 1 | 5 | 4 | 01 | | Aset Tidak Berwujud |
| 1 | 5 | 4 | 01 | 01 | Aset Tidak Berwujud |
| 1 | 5 | 4 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 1 | 5 | 5 | | | Aset Lain-lain |
| 1 | 5 | 5 | 01 | | Aset Lain-lain |
| 1 | 5 | 5 | 01 | 01 | Aset Lain-lain.... |
| 1 | 5 | 5 | 01 | 02 | Dst. |

B. KEWAJIBAN

KODE REKENING KEWAJIBAN

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 2 | | | | | KEWAJIBAN |
| 2 | 1 | | | | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK |
| 2 | 1 | 1 | | | Utang Perhitungan Pihak Ketiga |
| 2 | 1 | 1 | 01 | | Utang Taspen |
| 2 | 1 | 1 | 01 | 01 | Utang Taspen |
| 2 | 1 | 1 | 02 | | Utang Askes |
| 2 | 1 | 1 | 02 | 01 | Utang Askes |
| 2 | 1 | 1 | 03 | | Utang PPh Pusat |
| 2 | 1 | 1 | 03 | 01 | Utang PPh Pusat |
| 2 | 1 | 1 | 04 | | Utang PPN Pusat |
| 2 | 1 | 1 | 04 | 01 | Utang PPN Pusat |
| 2 | 1 | 1 | 05 | | Utang Taperum |
| 2 | 1 | 1 | 05 | 01 | Utang Taperum |
| 2 | 1 | 1 | 06 | | Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya |
| 2 | 1 | 1 | 06 | 01 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya |
| 2 | 1 | 1 | 06 | 02 | Dst. |
| 2 | 1 | 2 | | | Utang Bunga |
| 2 | 1 | 2 | 01 | | Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat |
| 2 | 1 | 2 | 01 | 01 | Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat |
| 2 | 1 | 2 | 02 | | Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya |
| 2 | 1 | 2 | 02 | 01 | Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya |
| 2 | 1 | 2 | 02 | 02 | Dst. |
| 2 | 1 | 2 | 03 | | Utang Bunga kepada BUMN/BUMD |
| 2 | 1 | 2 | 03 | 01 | Utang Bunga kepada BUMN.... |
| 2 | 1 | 2 | 03 | 02 | Utang Bunga kepada BUMD.... |
| 2 | 1 | 2 | 03 | 03 | Dst. |
| 2 | 1 | 2 | 04 | | Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan |
| 2 | 1 | 2 | 04 | 01 | Utang Bunga kepada Bank |
| 2 | 1 | 2 | 04 | 02 | Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan |
| 2 | 1 | 2 | 04 | 03 | Dst. |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 05 | | Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya |
| 2 | 1 | 2 | 05 | 01 | Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 2 | 1 | 2 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 06 | | Utang Bunga Luar Negeri |
| 2 | 1 | 2 | 06 | 01 | Utang Bunga Luar Negeri |
| 2 | 1 | 2 | 06 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | | Utang Pajak |
| 2 | 1 | 3 | 01 | | Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 |
| 2 | 1 | 3 | 01 | 01 | Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 02 | | Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 |
| 2 | 1 | 3 | 02 | 01 | Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 03 | | Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai |
| 2 | 1 | 3 | 03 | 01 | Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | | | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang |
| 2 | 1 | 4 | 01 | | Utang Bank |
| 2 | 1 | 4 | 01 | 01 | Utang Bank |
| 2 | 1 | 4 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 02 | | Utang Obligasi |
| 2 | 1 | 4 | 02 | 01 | Utang Obligasi |
| 2 | 1 | 4 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 03 | | Utang Pemerintah Pusat |
| 2 | 1 | 4 | 03 | 01 | Utang Pemerintah Pusat |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 04 | | Utang Pemerintah Provinsi |
| 2 | 1 | 4 | 04 | 01 | Utang Pemerintah Provinsi |
| 2 | 1 | 4 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 05 | | Utang Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2 | 1 | 4 | 05 | 01 | Utang Pemerintah Kabupaten |
| 2 | 1 | 4 | 05 | 02 | Utang Pemerintah Kota |
| 2 | 1 | 4 | 05 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 5 | | | Pendapatan Diterima Dimuka |
| 2 | 1 | 5 | 01 | | Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III |
| 2 | 1 | 5 | 01 | 01 | Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III.... |
| 2 | 1 | 5 | 01 | 02 | Dst. ... |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 02 | | Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III |
| 2 | 1 | 5 | 02 | 01 | Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III.... |
| 2 | 1 | 5 | 02 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 5 | 03 | | Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 2 | 1 | 5 | 03 | 01 | Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah |
| 2 | 1 | 5 | 03 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 2 | 1 | 6 | | | Utang Jangka Pendek Lainnya |
| 2 | 1 | 6 | 01 | | Utang Jangka Pendek Lainnya |
| 2 | 1 | 6 | 01 | 01 | Utang Jangka Pendek Lainnya |
| 2 | 1 | 6 | 01 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 2 | 2 | | | | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG |
| | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | Utang Dalam Negeri |
| 2 | 2 | 1 | 01 | | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan |
| 2 | 2 | 1 | 01 | 01 | Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan |
| 2 | 2 | 1 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 02 | | Utang Dalam Negeri Obligasi |
| 2 | 2 | 1 | 02 | 01 | Utang Dalam Negeri Obligasi |
| 2 | 2 | 1 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 03 | | Utang Pemerintah Pusat |
| 2 | 2 | 1 | 03 | 01 | Utang Pemerintah Pusat |
| | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 04 | | Utang Pemerintah Provinsi |
| 2 | 2 | 1 | 04 | 01 | Utang Pemerintah Provinsi |
| 2 | 2 | 1 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 05 | | Utang Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2 | 2 | 1 | 05 | 01 | Utang Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 2 | 2 | 1 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | | Utang Luar Negeri |
| 2 | 2 | 2 | 01 | | Utang Luar Negeri – Sektor Perbankan |
| 2 | 2 | 2 | 01 | 01 | Utang Luar Negeri – Sektor Perbankan |
| 2 | 2 | 2 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

C. EKUITAS DANA

KODE REKENING EKUITAS DANA

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|--|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 3 | | | | | EKUITAS DANA |
| | | | | | |
| 3 | 1 | | | | EKUITAS DANA LANCAR |
| | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) |
| | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | | Cadangan Piutang |
| 3 | 1 | 2 | 01 | | Cadangan Piutang |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 3 | 1 | 2 | 01 | 01 | Cadangan Piutang |
| | | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | | Cadangan Persediaan |
| 3 | 1 | 3 | 01 | | Cadangan Persediaan |
| 3 | 1 | 3 | 01 | 01 | Cadangan Persediaan |
| | | | | | |
| 3 | 1 | 4 | | | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek |
| 3 | 1 | 4 | 01 | | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek |
| 3 | 1 | 4 | 01 | 01 | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek |
| | | | | | |
| 3 | 2 | | | | EKUITAS DANA INVESTASI |
| | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang |
| 3 | 2 | 1 | 01 | | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang |
| 3 | 2 | 1 | 01 | 01 | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang |
| | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | | Diinvestasikan dalam Aset Tetap |
| 3 | 2 | 2 | 01 | | Diinvestasikan dalam Aset Tetap |
| 3 | 2 | 2 | 01 | 01 | Diinvestasikan dalam Aset Tetap |
| | | | | | |
| 3 | 2 | 3 | | | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) |
| 3 | 2 | 3 | 01 | | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) |
| 3 | 2 | 3 | 01 | 01 | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) |
| | | | | | |
| 3 | 2 | 4 | | | Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang |
| 3 | 2 | 4 | 01 | | Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang |
| 3 | 2 | 4 | 01 | 01 | Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| | | | | | |
| 3 | 3 | | | | EKUITAS DANA CADANGAN |
| | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | | | Diinvestasikan dalam Dana Cadangan |
| 3 | 3 | 1 | 01 | | Diinvestasikan dalam Dana Cadangan |
| 3 | 3 | 1 | 01 | 01 | Diinvestasikan dalam Dana Cadangan |

D. PENDAPATAN

KODE REKENING PENDAPATAN

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | | | | | PENDAPATAN DAERAH |
| 4 | 1 | | | | Pendapatan Asli Daerah |
| 4 | 1 | 1 | | | Hasil Pajak Daerah |
| 4 | 1 | 1 | 01 | | Pajak Hotel |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 01 | Hotel Bintang Lima Berlian |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 02 | Hotel Bintang Lima |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 03 | Hotel Bintang Empat |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 04 | Hotel Bintang Tiga |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 05 | Hotel Bintang Dua |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 06 | Hotel Bintang Satu |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 07 | Hotel Melati Tiga |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 08 | Hotel Melati Dua |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 09 | Hotel Melati Satu |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 10 | Motel |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 11 | Cottage |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 12 | Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 13 | Wisma Pariwisata |
| 4 | 1 | 1 | 01 | 14 | Dst. ... |
| 4 | 1 | 1 | 02 | | Pajak Restoran |
| 4 | 1 | 1 | 02 | 01 | Restoran |
| 4 | 1 | 1 | 02 | 02 | Rumah Makan |
| 4 | 1 | 1 | 02 | 03 | Café |
| 4 | 1 | 1 | 02 | 04 | Kantin |
| 4 | 1 | 1 | 02 | 05 | Katering |
| 4 | 1 | 1 | 02 | 06 | Dst. |
| 4 | 1 | 1 | 03 | | Pajak Hiburan |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 01 | Tontonan Film/Bioskop |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 02 | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 03 | Kontes Kecantikan |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 04 | Kontes Binaraga |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 05 | Pameran |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 06 | Diskotik |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 07 | Karaoke |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 08 | Klub Malam |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 09 | Sirkus/akrobat/sulap |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 10 | Permainan Bilyar |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 4 | 1 | 1 | 03 | 11 | Permainan Golf |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 12 | Permainan Bowling |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 13 | Pacuan Kuda |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 14 | Balap Kendaraan Bermotor |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 15 | Permainan Ketangkasan |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 16 | Panti Pijat/Refleksi |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 17 | Mandi Uap/spa |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 18 | Pusat Kebugaran |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 19 | Pertandingan Olahraga |
| 4 | 1 | 1 | 03 | 20 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 04 | | Pajak Reklame |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 01 | Reklame Papan/Bill Board/videotron/megatron |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 02 | Reklame Kain |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 03 | Reklame Melekat/Stiker |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 04 | Reklame Selebaran |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 05 | Reklame Berjalan |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 06 | Reklame Udara |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 07 | Reklame Apung |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 08 | Reklame Suara |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 09 | Reklame Film/slide |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 10 | Reklame Peragaan |
| 4 | 1 | 1 | 04 | 11 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 05 | | Pajak Penerangan Jalan |
| 4 | 1 | 1 | 05 | 01 | Pajak Penerangan Jalan PLN |
| 4 | 1 | 1 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 06 | | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C |
| 4 | 1 | 1 | 06 | 01 | Asbes |
| 4 | 1 | 1 | 06 | 02 | Batu tulis |
| 4 | 1 | 1 | 06 | 03 | Batu setengah permata |
| 4 | 1 | 1 | 06 | 04 | Batu kapur |
| 4 | 1 | 1 | 06 | 05 | Batu apung |
| 4 | 1 | 1 | 06 | 06 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 07 | | Pajak Parkir |
| 4 | 1 | 1 | 07 | 01 | Pajak Parkir |
| 4 | 1 | 1 | 07 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 08 | | Pajak Air Bawah Tanah |
| 4 | 1 | 1 | 08 | 01 | Pajak Air Bawah Tanah |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|----------------------------------|
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 08 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 09 | | Pajak Sarang Burung Walet |
| 4 | 1 | 1 | 09 | 01 | Pajak Sarang Burung Walet |
| 4 | 1 | 1 | 09 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 10 | | Pajak Lingkungan |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 4 | 1 | 1 | 10 | 01 | Pajak Lingkungan |
| 4 | 1 | 1 | 10 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | | | Hasil Retribusi Daerah |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 01 | | Retribusi Jasa Umum |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 03 | Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 04 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 05 | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 06 | Retribusi Pelayanan Pasar |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 07 | Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 08 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 09 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 10 | Retribusi Pelayanan Pendidikan |
| 4 | 1 | 2 | 01 | 11 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 02 | | Retribusi Jasa Usaha |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 02 | Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 03 | Retribusi Tempat Pelelangan |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 04 | Retribusi Terminal |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 06 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 07 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 08 | Retribusi Rumah Potong Hewan |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 09 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 10 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 11 | Retribusi Penyeberangan di air |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 12 | Retribusi Pengolahan Limbah Cair |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 13 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah |
| 4 | 1 | 2 | 02 | 14 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 03 | | Retribusi Perizinan tertentu |
| 4 | 1 | 2 | 03 | 01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 03 | 02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol |
| 4 | 1 | 2 | 03 | 03 | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian |
| 4 | 1 | 2 | 03 | 04 | Retribusi Izin Trayek |
| 4 | 1 | 2 | 03 | 05 | Retribusi Izin Usaha Perikanan |
| 4 | 1 | 2 | 03 | 06 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 4 | 1 | 3 | 01 | | Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD |
| 4 | 1 | 3 | 01 | 01 | Perusahaan daerah |
| 4 | 1 | 3 | 01 | 02 | BUMD |
| 4 | 1 | 3 | 01 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 02 | | Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN |
| 4 | 1 | 3 | 02 | 01 | BUMN |
| 4 | 1 | 3 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 3 | 03 | | Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta |
| 4 | 1 | 3 | 03 | 01 | Perusahaan |
| 4 | 1 | 3 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | | | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 01 | | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 01 | Pelepasan Hak Atas Tanah |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 02 | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 03 | Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 04 | Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 05 | Penjualan Kendaraan Dinas roda dua |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 06 | Penjualan Kendaraan Dinas roda empat |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 07 | Penjualan Drum Bekas |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 08 | Penjualan Hasil Penebangan Pohon |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 09 | Penjualan Lampu Hias Bekas |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 10 | Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 11 | Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 12 | Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 13 | Penjualan hasil pertanian |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 14 | Penjualan hasil kehutanan |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 15 | Penjualan hasil perkebunan |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 16 | Penjualan hasil peternakan |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 17 | Penjualan hasil perikanan |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 18 | Penjualan hasil sitaan |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|----------------------------------|
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 01 | 19 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 02 | | Penerimaan Jasa Giro |
| 4 | 1 | 4 | 02 | 01 | Jasa Giro Kas Daerah |
| 4 | 1 | 4 | 02 | 02 | Jasa Giro Pemegang Kas |
| 4 | 1 | 4 | 02 | 03 | Jasa Giro Dana Cadangan |
| 4 | 1 | 4 | 02 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 03 | | Pendapatan Bunga Deposito |
| 4 | 1 | 4 | 03 | 01 | Rekening Deposito pada Bank |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 4 | 1 | 4 | 03 | 02 | Dst. |
| 4 | 1 | 4 | 04 | | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |
| 4 | 1 | 4 | 04 | 01 | Kerugian Uang |
| 4 | 1 | 4 | 04 | 02 | Kerugian Barang |
| 4 | 1 | 4 | 04 | 03 | Dst. |
| 4 | 1 | 4 | 05 | | Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah |
| 4 | 1 | 4 | 05 | 01 | Penerimaan Komisi dari penempatan Kas daerah |
| 4 | 1 | 4 | 05 | 02 | Penerimaan Potongan dari |
| 4 | 1 | 4 | 05 | 03 | Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari |
| 4 | 1 | 4 | 05 | 04 | Dst. |
| 4 | 1 | 4 | 06 | | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 01 | Bidang Pendidikan |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 02 | Bidang Kesehatan |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 03 | Bidang Pekerjaan Umum |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 04 | Bidang Perumahan Rakyat |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 05 | Bidang Penataan Ruang |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 06 | Bidang Perencanaan Pembangunan |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 07 | Bidang Perhubungan |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 08 | Bidang Lingkungan Hidup |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 09 | Bidang Pertanahan |
| 4 | 1 | 4 | 06 | 10 | Dst. |
| 4 | 1 | 4 | 07 | | Pendapatan Denda Pajak |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 01 | Pendapatan Denda Pajak Hotel |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 02 | Pendapatan Denda Pajak Restoran |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 03 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 04 | Pendapatan Denda Pajak Reklame |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 05 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 06 | Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 07 | Pendapatan Denda Pajak Parkir |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 08 | Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 09 | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 10 | Pendapatan Denda Pajak Lingkungan |
| 4 | 1 | 4 | 07 | 11 | Dst. |
| 4 | 1 | 4 | 08 | | Pendapatan Denda Retribusi |
| 4 | 1 | 4 | 08 | 01 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum |
| 4 | 1 | 4 | 08 | 02 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha |
| 4 | 1 | 4 | 08 | 03 | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu |
| 4 | 1 | 4 | 08 | 04 | Dst. |
| 4 | 1 | 4 | 09 | | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 4 | 1 | 4 | 09 | 01 | Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan |
| 4 | 1 | 4 | 09 | 02 | Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame |
| 4 | 1 | 4 | 09 | 03 | Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman |
| 4 | 1 | 4 | 09 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 10 | | Pendapatan dari Pengembalian |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 01 | Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 02 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 03 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 04 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 05 | Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka |
| 4 | 1 | 4 | 10 | 06 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 11 | | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum |
| 4 | 1 | 4 | 11 | 01 | Fasilitas Sosial |
| 4 | 1 | 4 | 11 | 02 | Fasilitas Umum |
| 4 | 1 | 4 | 11 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 12 | | Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |
| 4 | 1 | 4 | 12 | 01 | Uang Pendaftaran/Ujian Masuk |
| 4 | 1 | 4 | 12 | 02 | Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan |
| 4 | 1 | 4 | 12 | 03 | Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas |
| 4 | 1 | 4 | 12 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 13 | | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan |
| 4 | 1 | 4 | 13 | 01 | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah |
| 4 | 1 | 4 | 13 | 02 | Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan |
| 4 | 1 | 4 | 13 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | 2 | | | | Dana Perimbangan |
| 4 | 2 | 1 | | | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak |
| 4 | 2 | 1 | 01 | | Bagi Hasil Pajak |
| 4 | 2 | 1 | 01 | 01 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan |
| 4 | 2 | 1 | 01 | 02 | Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |
| 4 | 2 | 1 | 01 | 03 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 |
| 4 | 2 | 1 | 01 | 04 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 02 | | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 01 | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 02 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 03 | Bagi Hasil dari Dana Reboisasi |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 4 | 2 | 1 | 02 | 04 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 05 | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 06 | Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 07 | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 08 | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 09 | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 10 | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi |
| 4 | 2 | 1 | 02 | 11 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 2 | 2 | | | Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | 01 | | Dana Alokasi Umum |
| 4 | 2 | 2 | 01 | 01 | Dana Alokasi Umum |
| | | | | | |
| 4 | 2 | 3 | | | Dana Alokasi Khusus |
| 4 | 2 | 3 | 01 | | Dana alokasi khusus |
| 4 | 2 | 3 | 01 | 01 | Dana alokasi khusus |
| 4 | 2 | 3 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | | | | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | | | Pendapatan Hibah |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 01 | | Pendapatah Hibah dari Pemerintah |
| 4 | 3 | 1 | 01 | 01 | Pemerintah |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 02 | | Pendapatah Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya |
| 4 | 3 | 1 | 02 | 01 | Pemerintah Daerah |
| 4 | 3 | 1 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 03 | | Pendapatah Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri |
| 4 | 3 | 1 | 03 | 01 | Badan/lembaga/organisasi swasta |
| 4 | 3 | 1 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 04 | | Pendapatah Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan |
| 4 | 3 | 1 | 04 | 01 | Kelompok masyarakat/perorangan |
| 4 | 3 | 1 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 05 | | Pendapatah Hibah dari Luar Negeri |
| 4 | 3 | 1 | 05 | 01 | Pendapatan Hibah dari Bilateral |
| 4 | 3 | 1 | 05 | 02 | Pendapatan Hibah dari Multilateral |
| 4 | 3 | 1 | 05 | 03 | Pendapatan Hibah dari Donor lainnya |
| 4 | 3 | 1 | 05 | 04 | Dst. |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 4 | 3 | 2 | | | Dana Darurat |
| 4 | 3 | 2 | 01 | | Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam |
| 4 | 3 | 2 | 01 | 01 | Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam |
| 4 | 3 | 2 | 01 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 3 | | | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya |
| 4 | 3 | 3 | 01 | | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi |
| 4 | 3 | 3 | 01 | 01 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor |
| 4 | 3 | 3 | 01 | 02 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air |
| 4 | 3 | 3 | 01 | 03 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |
| 4 | 3 | 3 | 01 | 04 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air |
| 4 | 3 | 3 | 01 | 05 | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |
| 4 | 3 | 3 | 01 | 06 | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah |
| 4 | 3 | 3 | 01 | 07 | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan |
| 4 | 3 | 3 | 01 | 08 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 3 | 02 | | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi |
| 4 | 3 | 3 | 02 | 01 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi |
| 4 | 3 | 3 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 3 | 03 | | Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten |
| 4 | 3 | 3 | 03 | 01 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten |
| 4 | 3 | 3 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 3 | 04 | | Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota |
| 4 | 3 | 3 | 04 | 01 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota |
| 4 | 3 | 3 | 04 | 02 | Dst. |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 4 | 3 | 4 | | | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 4 | 01 | | Dana Penyesuaian |
| 4 | 3 | 4 | 01 | 01 | Dana Penyesuaian |
| 4 | 3 | 4 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 4 | 02 | | Dana Otonomi Khusus |
| 4 | 3 | 4 | 02 | 01 | Dana Otonomi Khusus |
| 4 | 3 | 4 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 5 | | | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 5 | 01 | | Bantuan Keuangan dari Provinsi |
| 4 | 3 | 5 | 01 | 01 | Bantuan Keuangan dari Provinsi |
| 4 | 3 | 5 | 01 | 02 | Dst. |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 4 | 3 | 5 | 02 | | Bantuan Keuangan dari Kabupaten |
| 4 | 3 | 5 | 02 | 01 | Bantuan Keuangan dari Kabupaten |
| 4 | 3 | 5 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 4 | 3 | 5 | 03 | | Bantuan Keuangan dari Kota |
| 4 | 3 | 5 | 03 | 01 | Bantuan Keuangan dari Kota |
| 4 | 3 | 5 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |

E. BELANJA

KODE REKENING BELANJA DAERAH

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | | | | | BELANJA DAERAH |
| 5 | 1 | | | | BELANJA TIDAK LANGSUNG |
| 5 | 1 | 1 | | | BELANJA PEGAWAI |
| 5 | 1 | 1 | 01 | | Gaji dan Tunjangan |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ¹⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 02 | Tunjangan Keluarga |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 03 | Tunjangan Jabatan |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 04 | Tunjangan Fungsional |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 05 | Tunjangan Fungsional Umum |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 06 | Tunjangan Beras |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 08 | Pembulatan Gaji |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 09 | Iuran Asuransi Kesehatan |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 10 | Uang Paket ²⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 11 | Tunjangan Panitia Musyawarah ²⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 12 | Tunjangan Komisi ²⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 13 | Tunjangan Panitia Anggaran ²⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 14 | Tunjangan Badan Kehormatan ²⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya ²⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 16 | Tunjangan Perumahan ²⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 17 | Uang Duka Wafat/Tewas ¹⁾ |
| 5 | 1 | 1 | 01 | 18 | Uang Jasa Pengabdian ²⁾ |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 02 | | Tambahan Penghasilan PNS |
| 5 | 1 | 1 | 02 | 01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja |
| 5 | 1 | 1 | 02 | 02 | Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas |
| 5 | 1 | 1 | 02 | 03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja |
| 5 | 1 | 1 | 02 | 04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi |
| 5 | 1 | 1 | 02 | 05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|--------|--|
| 5 | 1 | 1 | 03 | | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH |
| 5 | 1 | 1 | 03 | 01 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD |
| 5 | 1 | 1 | 03 | 02 | Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD |
| 5 | 1 | 1 | 03 | 03 | Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH |
| | | | | | |
| | | | | | |
| KODE REKENING | | | | URAIAN | |
| 1 | | | | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 04 | | Biaya Pemungutan Pajak Daerah |
| 5 | 1 | 1 | 04 | 01 | Biaya pemungutan PBB |
| 5 | 1 | 1 | 04 | 02 | Biaya pemungutan Pajak Daerah |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 2 | | | BELANJA BUNGA |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 2 | 01 | | Bunga Utang Pinjaman |
| 5 | 1 | 2 | 01 | 01 | Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah |
| 5 | 1 | 2 | 01 | 02 | Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya |
| 5 | 1 | 2 | 01 | 03 | Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank |
| 5 | 1 | 2 | 01 | 04 | Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank |
| 5 | 1 | 2 | 01 | 05 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 2 | 02 | | Bunga Utang Obligasi |
| 5 | 1 | 2 | 02 | 01 | Bunga Utang Obligasi |
| 5 | 1 | 2 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | | | BELANJA SUBSIDI |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 3 | 01 | | Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga |
| 5 | 1 | 3 | 01 | 01 | Belanja Subsidi kepada Perusahaan |
| 5 | 1 | 3 | 01 | 02 | Belanja Subsidi kepada Lembaga |
| 5 | 1 | 3 | 01 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 4 | | | BELANJA HIBAH |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 4 | 01 | | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat |
| 5 | 1 | 4 | 01 | 01 | Pemerintah Pusat |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 4 | 02 | | Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya |
| 5 | 1 | 4 | 02 | 01 | Pemerintah Daerah |
| 5 | 1 | 4 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 4 | 03 | | Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa |
| 5 | 1 | 4 | 03 | 01 | Pemerintahan Desa |
| 5 | 1 | 4 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 4 | 04 | | Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|----------------------------------|
| 5 | 1 | 4 | 04 | 01 | Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN |
| 5 | 1 | 4 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 05 | | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta |
| 5 | 1 | 4 | 05 | 01 | Badan/Lembaga/Organisasi Swasta |
| 5 | 1 | 4 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 4 | 06 | | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan |
| 5 | 1 | 4 | 06 | 01 | Kelompok Masyarakat/Perorangan |
| 5 | 1 | 4 | 06 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 5 | | | BELANJA BANTUAN SOSIAL |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 5 | 01 | | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan |
| 5 | 1 | 5 | 01 | 01 | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan |
| 5 | 1 | 5 | 01 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 5 | 02 | | Belanja Bantuan Partai Politik |
| 5 | 1 | 5 | 02 | 01 | Belanja Bantuan Partai Politik |
| 5 | 1 | 5 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 6 | | | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 6 | 01 | | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi |
| 5 | 1 | 6 | 01 | 01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi |
| 5 | 1 | 6 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 6 | 02 | | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota |
| 5 | 1 | 6 | 02 | 01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota |
| 5 | 1 | 6 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 6 | 03 | | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa |
| 5 | 1 | 6 | 03 | 01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa |
| 5 | 1 | 6 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 6 | 04 | | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| | | | | | Kabupaten/Kota |
| 5 | 1 | 6 | 04 | 01 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota |
| 5 | 1 | 6 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 6 | 05 | | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa |
| 5 | 1 | 6 | 05 | 01 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa |
| 5 | 1 | 6 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 1 | 7 | | | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 01 | | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi |
| 5 | 1 | 7 | 01 | 01 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi |
| 5 | 1 | 7 | 01 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 02 | | Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota |
| 5 | 1 | 7 | 02 | 01 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota |
| 5 | 1 | 7 | 02 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 03 | | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa |
| 5 | 1 | 7 | 03 | 01 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa |
| 5 | 1 | 7 | 03 | 02 | Dst. ... |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 04 | | Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintahan Desa lainnya |
| 5 | 1 | 7 | 04 | 01 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi |
| 5 | 1 | 7 | 04 | 02 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota |
| 5 | 1 | 7 | 04 | 03 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa |
| 5 | 1 | 7 | 04 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 8 | | | BELANJA TIDAK TERDUGA |
| | | | | | |
| 5 | 1 | 8 | 01 | | Belanja Tidak Terduga |
| 5 | 1 | 8 | 01 | 01 | Belanja Tidak Terduga |
| | | | | | |
| 5 | 2 | | | | BELANJA LANGSUNG |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | | | BELANJA PEGAWAI |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 5 | 2 | 1 | 01 | | Honorarium PNS |
| 5 | 2 | 1 | 01 | 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan |
| 5 | 2 | 1 | 01 | 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa |
| 5 | 2 | 1 | 01 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 02 | | Honorarium Non PNS |
| 5 | 2 | 1 | 02 | 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber |
| 5 | 2 | 1 | 02 | 02 | Honorarium Pegawai Honorarier/tidak tetap |
| 5 | 2 | 1 | 02 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 03 | | Uang Lembur |
| 5 | 2 | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS |
| 5 | 2 | 1 | 03 | 02 | Uang Lembur Non PNS |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 04 | | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS |
| 5 | 2 | 1 | 04 | 01 | Belanja Beasiswa tugas belajar D3 |
| 5 | 2 | 1 | 04 | 02 | Belanja Beasiswa tugas belajar S1 |
| 5 | 2 | 1 | 04 | 03 | Belanja Beasiswa tugas belajar S2 |
| 5 | 2 | 1 | 04 | 04 | Belanja Beasiswa tugas belajar S3 |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 1 | 05 | | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS |
| 5 | 2 | 1 | 05 | 01 | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan |
| 5 | 2 | 1 | 05 | 02 | Belanja sosialisasi |
| 5 | 2 | 1 | 05 | 03 | Belanja bimbingan teknis |
| 5 | 2 | 1 | 05 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | | | BELANJA BARANG DAN JASA |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 01 | | Belanja Bahan Pakai Habis |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 02 | Belanja dokumen/administrasi tender |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 03 | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 05 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 06 | Belanja bahan bakar minyak/gas |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 07 | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 08 | Belanja pengisian tabung gas |
| 5 | 2 | 2 | 01 | 09 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 02 | | Belanja Bahan / Material |
| 5 | 2 | 2 | 02 | 01 | Belanja bahan baku bangunan |
| 5 | 2 | 2 | 02 | 02 | Belanja bahan/bibit tanaman |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 5 | 2 | 2 | 02 | 03 | Belanja bibit ternak |
| 5 | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja bahan obat-obatan |
| 5 | 2 | 2 | 02 | 05 | Belanja bahan kimia |
| 5 | 2 | 2 | 02 | 06 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 03 | | Belanja Jasa Kantor |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 01 | Belanja telepon |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 02 | Belanja air |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 03 | Belanja listrik |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 04 | Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 05 | Belanja surat kabar/majalah |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 06 | Belanja kawat/faksimili/internet |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 07 | Belanja paket/pengiriman |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 08 | Belanja sertifikasi |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 09 | Belanja jasa transaksi keuangan |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 10 | Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 11 | Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |
| 5 | 2 | 2 | 03 | 12 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 04 | | Belanja Premi Asuransi |
| 5 | 2 | 2 | 04 | 01 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan |
| 5 | 2 | 2 | 04 | 02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah |
| 5 | 2 | 2 | 04 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 05 | | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor |
| 5 | 2 | 2 | 05 | 01 | Belanja Jasa Service |
| 5 | 2 | 2 | 05 | 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang |
| 5 | 2 | 2 | 05 | 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas |
| 5 | 2 | 2 | 05 | 04 | Belanja Jasa KIR |
| 5 | 2 | 2 | 05 | 05 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan |
| 5 | 2 | 2 | 05 | 06 | Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi |
| 5 | 2 | 2 | 05 | 07 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 06 | | Belanja Cetak dan Penggandaan |
| 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja cetak |
| 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan |
| 5 | 2 | 2 | 06 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 07 | | Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir |
| 5 | 2 | 2 | 07 | 01 | Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas |
| 5 | 2 | 2 | 07 | 02 | Belanja sewa gedung / kantor / tempat |
| 5 | 2 | 2 | 07 | 03 | Belanja sewa ruang rapat / pertemuan |
| 5 | 2 | 2 | 07 | 04 | Belanja sewa tempat parker / uang tambat / hangar sarana mobilitas |
| 5 | 2 | 2 | 07 | 05 | Dst. |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--------------------------------------|
| 5 | 2 | 2 | 08 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas |
| 5 | 2 | 2 | 08 | 01 | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat |
| 5 | 2 | 2 | 08 | 02 | Belanja sewa Sarana Mobilitas Air |
| 5 | 2 | 2 | 08 | 03 | Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara |
| 5 | 2 | 2 | 08 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 09 | | Belanja Sewa Alat Berat |
| 5 | 2 | 2 | 09 | 01 | Belanja sewa Eskavator |
| 5 | 2 | 2 | 09 | 02 | Belanja sewa Buldoser |
| 5 | 2 | 2 | 09 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 10 | | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |
| 5 | 2 | 2 | 10 | 01 | Belanja sewa meja kursi |
| 5 | 2 | 2 | 10 | 02 | Belanja sewa komputer dan printer |
| 5 | 2 | 2 | 10 | 03 | Belanja sewa proyektor |
| 5 | 2 | 2 | 10 | 04 | Belanja sewa generator |
| 5 | 2 | 2 | 10 | 05 | Belanja sewa tenda |
| 5 | 2 | 2 | 10 | 06 | Belanja sewa pakaian adat/tradisional |
| 5 | 2 | 2 | 10 | 07 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 11 | | Belanja Makanan dan Minuman |
| 5 | 2 | 2 | 11 | 01 | Belanja makanan dan minuman harian pegawai |
| 5 | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja makanan dan minuman rapat |
| 5 | 2 | 2 | 11 | 03 | Belanja makanan dan minuman tamu |
| 5 | 2 | 2 | 11 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 12 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya |
| 5 | 2 | 2 | 12 | 01 | Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH |
| 5 | 2 | 2 | 12 | 02 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) |
| 5 | 2 | 2 | 12 | 03 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) |
| 5 | 2 | 2 | 12 | 04 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) |
| 5 | 2 | 2 | 12 | 05 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) |
| 5 | 2 | 2 | 12 | 06 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 13 | | Belanja Pakaian Kerja |
| 5 | 2 | 2 | 13 | 01 | Belanja pakaian kerja lapangan |
| 5 | 2 | 2 | 13 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 14 | | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu |
| 5 | 2 | 2 | 14 | 01 | Belanja pakaian KORPRI |
| 5 | 2 | 2 | 14 | 02 | Belanja pakaian adat daerah |
| 5 | 2 | 2 | 14 | 03 | Belanja pakaian batik tradisional |
| 5 | 2 | 2 | 14 | 04 | Belanja pakaian olahraga |
| 5 | 2 | 2 | 14 | 05 | Dst. |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---------------------------------------|
| 5 | 2 | 2 | 15 | | Belanja Perjalanan Dinas |
| 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah |
| 5 | 2 | 2 | 15 | 02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 16 | | Belanja Perjalanan Pindah Tugas |
| 5 | 2 | 2 | 16 | 01 | Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah |
| 5 | 2 | 2 | 16 | 02 | Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | 17 | | Belanja Pemulangan Pegawai |
| 5 | 2 | 2 | 17 | 01 | Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah |
| 5 | 2 | 2 | 17 | 02 | Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah |
| 5 | 2 | 2 | 17 | 03 | Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas |
| 5 | 2 | 2 | 17 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | | | BELANJA MODAL |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 01 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 01 | Belanja modal pengadaan tanah kantor |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 02 | Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 03 | Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 04 | Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 05 | Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 06 | Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 07 | Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 08 | Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 09 | Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 10 | Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 11 | Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 12 | Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 13 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 14 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 15 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 16 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| | | | | | rumah potong hewan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 17 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 18 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 19 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 20 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 21 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 22 | Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 23 | Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 24 | Belanja modal pengadaan tanah perumahan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 25 | Belanja modal pengadaan tanah pertanian |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 26 | Belanja modal pengadaan tanah perkebunan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 27 | Belanja modal pengadaan tanah perikanan |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 28 | Belanja modal pengadaan tanah peternakan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 29 | Belanja modal pengadaan tanah perkampungan |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 30 | Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku |
| 5 | 2 | 3 | 01 | 31 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 02 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 01 | Belanja modal pengadaan traktor |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 02 | Belanja modal pengadaan buldozer |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 03 | Belanja modal pengadaan stoom wals |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 04 | Belanja modal pengadaan eskavator |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 05 | Belanja modal pengadaan dump truk |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 06 | Belanja modal pengadaan crane |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 07 | Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 08 | Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 09 | Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis) |
| 5 | 2 | 3 | 02 | 10 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 03 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 01 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 02 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 03 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 04 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 5 | 2 | 3 | 03 | 05 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 06 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 07 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 08 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 09 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 10 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 11 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 12 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 13 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 14 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan |
| 5 | 2 | 3 | 03 | 15 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 04 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor |
| 5 | 2 | 3 | 04 | 01 | Belanja modal pengadaan gerobak |
| 5 | 2 | 3 | 04 | 02 | Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 04 | 03 | Belanja modal pengadaan becak |
| 5 | 2 | 3 | 04 | 04 | Belanja modal pengadaan sepeda |
| 5 | 2 | 3 | 04 | 05 | Belanja modal pengadaan karavan |
| 5 | 2 | 3 | 04 | 06 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 05 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 01 | Belanja modal pengadaan kapal motor |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 02 | Belanja modal pengadaan kapal feri |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 03 | Belanja modal pengadaan speed boat |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 04 | Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 05 | Belanja modal pengadaan hydro foil |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 06 | Belanja modal pengadaan jet foil |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 07 | Belanja modal pengadaan kapal tug boat |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 08 | Belanja modal pengadaan kapal tanker |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 09 | Belanja modal pengadaan kapal kargo |
| 5 | 2 | 3 | 05 | 10 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 06 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor |
| 5 | 2 | 3 | 06 | 01 | Belanja modal pengadaan perahu layar |
| 5 | 2 | 3 | 06 | 02 | Belanja modal pengadaan perahu sampan |
| 5 | 2 | 3 | 06 | 03 | Belanja modal pengadaan perahu tongkang |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 5 | 2 | 3 | 06 | 04 | Belanja modal pengadaan perahu karet |
| 5 | 2 | 3 | 06 | 05 | Belanja modal pengadaan perahu rakit |
| 5 | 2 | 3 | 06 | 06 | Belanja modal pengadaan perahu sekoci |
| 5 | 2 | 3 | 06 | 07 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 07 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara |
| 5 | 2 | 3 | 07 | 01 | Belanja modal pengadaan pesawat kargo |
| 5 | 2 | 3 | 07 | 02 | Belanja modal pengadaan pesawat penumpang |
| 5 | 2 | 3 | 07 | 03 | Belanja modal pengadaan pesawat helikopter |
| 5 | 2 | 3 | 07 | 04 | Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran |
| 5 | 2 | 3 | 07 | 05 | Belanja modal pengadaan pesawat capung |
| 5 | 2 | 3 | 07 | 06 | Belanja modal pengadaan pesawat terbang ampibi |
| 5 | 2 | 3 | 07 | 07 | Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang |
| 5 | 2 | 3 | 07 | 08 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 08 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel |
| 5 | 2 | 3 | 08 | 01 | Belanja modal pengadaan mesin las |
| 5 | 2 | 3 | 08 | 02 | Belanja modal pengadaan mesin bubut |
| 5 | 2 | 3 | 08 | 03 | Belanja modal pengadaan mesin dongkrak |
| 5 | 2 | 3 | 08 | 04 | Belanja modal pengadaan mesin kompresor |
| 5 | 2 | 3 | 08 | 05 | Dst. |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 09 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan |
| 5 | 2 | 3 | 09 | 01 | Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian |
| 5 | 2 | 3 | 09 | 02 | Belanja modal pengadaan alat pengering gabah |
| 5 | 2 | 3 | 09 | 03 | Belanja modal pengadaan mesin bajak |
| 5 | 2 | 3 | 09 | 04 | Belanja modal pengadaan alat penetas |
| 5 | 2 | 3 | 09 | 05 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 10 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 01 | Belanja modal pengadaan mesin tik |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 02 | Belanja modal pengadaan mesin hitung |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 03 | Belanja modal pengadaan mesin stensil |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 04 | Belanja modal pengadaan mesin fotocopy |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 05 | Belanja modal pengadaan mesin cetak |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 06 | Belanja modal pengadaan mesin jilid |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 07 | Belanja modal pengadaan mesin potong kertas |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 08 | Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 09 | Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | Belanja modal pengadaan papan visual elektronik |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran |
| 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 11 | | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| | | | | | Kantor |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 01 | Belanja modal pengadaan meja gambar |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 02 | Belanja modal pengadaan almari |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 03 | Belanja modal pengadaan brankas |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 04 | Belanja modal pengadaan filling kabinet |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 05 | Belanja modal pengadaan white board |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 06 | Belanja modal pengadaan penunjuk waktu |
| 5 | 2 | 3 | 11 | 07 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 12 | | Belanja Modal Pengadaan Komputer |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 01 | Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 02 | Belanja modal pengadaan komputer/PC |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 03 | Belanja modal pengadaan komputer note book |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 04 | Belanja modal pengadaan printer |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 05 | Belanja modal pengadaan scanner |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 06 | Belanja modal pengadaan monitor/display |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 07 | Belanja modal pengadaan CPU |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 08 | Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 09 | Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 13 | | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 01 | Belanja modal pengadaan meja kerja |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 02 | Belanja modal pengadaan meja rapat |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 03 | Belanja modal pengadaan meja makan |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 04 | Belanja modal pengadaan kursi kerja |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 05 | Belanja modal pengadaan kursi rapat |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 06 | Belanja modal pengadaan kursi makan |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 07 | Belanja modal pengadaan tempat tidur |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 08 | Belanja modal pengadaan sofa |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 09 | Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang |
| 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 14 | | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 01 | Belanja modal pengadaan tabung gas |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 02 | Belanja modal pengadaan kompor gas |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 03 | Belanja modal pengadaan lemari makan |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 04 | Belanja modal pengadaan dispenser |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 05 | Belanja modal pengadaan kulkas |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 06 | Belanja modal pengadaan rak piring |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 07 | Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 08 | Dst. |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 5 | 2 | 3 | 15 | | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 01 | Belanja modal pengadaan lampu hias |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 02 | Belanja modal pengadaan jam dinding/meja |
| 5 | 2 | 3 | 15 | 03 | Dst. |
| 5 | 2 | 3 | 16 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 01 | Belanja modal pengadaan kamera |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 02 | Belanja modal pengadaan handycam |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 03 | Belanja modal pengadaan proyektor |
| 5 | 2 | 3 | 16 | 04 | Dst. |
| 5 | 2 | 3 | 17 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 01 | Belanja modal pengadaan telepon |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 02 | Belanja modal pengadaan faximili |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 03 | Belanja modal pengadaan radio SSB |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 04 | Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 05 | Belanja modal pengadaan radio VHF |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 06 | Belanja modal pengadaan radio UHF |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 07 | Belanja modal pengadaan alat sandi |
| 5 | 2 | 3 | 17 | 08 | Dst. |
| 5 | 2 | 3 | 18 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 01 | Belanja modal pengadaan timbangan |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 02 | Belanja modal pengadaan teodolite |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 03 | Belanja modal pengadaan alat uji emisi |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 04 | Belanja modal pengadaan alat GPS |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 05 | Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 06 | Belanja modal pengadaan bejana ukur |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 07 | Belanja modal pengadaan barometer |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 08 | Belanja modal pengadaan seismograph |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 09 | Belanja modal pengadaan ultrasonograph |
| 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | Dst. |
| 5 | 2 | 3 | 19 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 01 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 02 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 03 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 04 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 05 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 06 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| | | | | | anak |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 07 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 08 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 09 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | Belanja modal pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis |
| 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 20 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 01 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 02 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 03 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 04 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 05 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 06 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 07 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 08 | Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 09 | Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|---|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 21 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan |
| 5 | 2 | 3 | 21 | 01 | Belanja modal pengadaan konstruksi jalan |
| 5 | 2 | 3 | 21 | 02 | Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over |
| 5 | 2 | 3 | 21 | 03 | Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass |
| 5 | 2 | 3 | 21 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 22 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 5 | 2 | 3 | 22 | 01 | Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung |
| 5 | 2 | 3 | 22 | 02 | Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton |
| 5 | 2 | 3 | 22 | 03 | Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang |
| 5 | 2 | 3 | 22 | 04 | Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air |
| 5 | 2 | 3 | 22 | 05 | Dst. |
| 5 | 2 | 3 | 23 | | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 01 | Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 02 | Belanja modal pengadaan konstruksi waduk |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 03 | Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 04 | Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 05 | Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 06 | Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 07 | Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 08 | Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air |
| 5 | 2 | 3 | 23 | 09 | Dst. |
| 5 | 2 | 3 | 24 | | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota |
| 5 | 2 | 3 | 24 | 01 | Belanja modal pengadaan lampu hias jalan |
| 5 | 2 | 3 | 24 | 02 | Belanja modal pengadaan lampu hias taman |
| 5 | 2 | 3 | 24 | 03 | Belanja modal pengadaan lampu penerang hutan kota |
| 5 | 2 | 3 | 24 | 04 | Dst. |
| 5 | 2 | 3 | 25 | | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon |
| 5 | 2 | 3 | 25 | 01 | Belanja modal pengadaan instalasi listrik |
| 5 | 2 | 3 | 25 | 02 | Belanja modal pengadaan instalasi telepon |
| 5 | 2 | 3 | 25 | 03 | Dst. |
| 5 | 2 | 3 | 26 | | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian *) Bangunan |
| 5 | 2 | 3 | 26 | 01 | Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung kantor |
| 5 | 2 | 3 | 26 | 02 | Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian rumah jabatan |
| 5 | 2 | 3 | 26 | 03 | Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian rumah dinas |
| 5 | 2 | 3 | 26 | 04 | Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung gudang |

| KODE REKENING | URAIAN |
|---------------|--------|
| 1 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 5 | 2 | 3 | 26 | 05 | Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian bangunan bersejarah |
| 5 | 2 | 3 | 26 | 06 | Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian bangunan monumen |
| 5 | 2 | 3 | 26 | 07 | Belanja modal pengadaan kontruksi tugu peringatan |
| 5 | 2 | 3 | 26 | 08 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 27 | | Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 01 | Belanja modal pengadaan buku matematika |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 02 | Belanja modal pengadaan buku fisika |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 03 | Belanja modal pengadaan buku kimia |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 04 | Belanja modal pengadaan buku biologi |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 05 | Belanja modal pengadaan buku biografi |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 06 | Belanja modal pengadaan buku geografi |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 07 | Belanja modal pengadaan buku astrologi |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 08 | Belanja modal pengadaan buku arkeologi |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 09 | Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 10 | Belanja modal pengadaan buku keagamaan |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 11 | Belanja modal pengadaan buku sejarah |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 12 | Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 15 | Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 17 | Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 18 | Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 20 | Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 21 | Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 22 | Belanja modal pengadaan buku buku naskah |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 23 | Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 24 | Belanja modal pengadaan mikrofilm |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe |
| 5 | 2 | 3 | 27 | 26 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 28 | | Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan |
| 5 | 2 | 3 | 28 | 01 | Belanja modal pengadaan lukisan/foto |
| 5 | 2 | 3 | 28 | 02 | Belanja modal pengadaan pengadaan patung |
| 5 | 2 | 3 | 28 | 03 | Belanja modal pengadaan ukiran |
| 5 | 2 | 3 | 28 | 04 | Belanja modal pengadaan pahatan |
| 5 | 2 | 3 | 28 | 05 | Belanja modal pengadaan batu alam |
| 5 | 2 | 3 | 28 | 06 | Belanja modal pengadaan |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|------------------------|
| | | | | | maket/miniatur/diorama |
| 5 | 2 | 3 | 28 | 07 | Dst. |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 29 | | Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman |
| 5 | 2 | 3 | 29 | 01 | Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang |
| 5 | 2 | 3 | 29 | 02 | Belanja modal pengadaan ternak |
| 5 | 2 | 3 | 29 | 03 | Belanja modal pengadaan tanaman |
| 5 | 2 | 3 | 29 | 04 | Dst. |
| | | | | | |
| 5 | 2 | 3 | 30 | | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keamanan |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 01 | Belanja modal pengadaan senjata api |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 02 | Belanja modal pengadaan radar |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 03 | Belanja modal pengadaan mobil water canon |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 04 | Belanja modal pengadaan borgol |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 05 | Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 06 | Belanja modal pengadaan perisai/tameng |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 07 | Belanja modal pengadaan detektor logam |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 08 | Belanja modal pengadaan rompi anti peluru |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 09 | Belanja modal pengadaan pentungan |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 10 | Belanja modal pengadaan helm |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 11 | Belanja modal pengadaan alarm/sirene |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 12 | Belanja modal pengadaan sentolop/senter |
| 5 | 2 | 3 | 30 | 13 | Dst. |
| | | | | | |

F. PEMBIAYAAN

KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 6 | | | | | PEMBIAYAAN DAERAH |
| 6 | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan Daerah |
| 6 | 1 | 1 | | | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya |
| 6 | 1 | 1 | 01 | | Pelampauan penerimaan PAD |
| 6 | 1 | 1 | 01 | 01 | Pajak Daerah |
| 6 | 1 | 1 | 01 | 02 | Retribusi Daerah |
| 6 | 1 | 1 | 01 | 03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 1 | 01 | 04 | Lain-lain PAD yang sah |
| 6 | 1 | 1 | 02 | | Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan |
| 6 | 1 | 1 | 02 | 01 | Bagi Hasil Pajak |
| 6 | 1 | 1 | 02 | 02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam |
| 6 | 1 | 1 | 02 | 03 | Dst. |
| 6 | 1 | 1 | 03 | | Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah |
| 6 | 1 | 1 | 03 | 01 | Dst. |
| 6 | 1 | 1 | 04 | | Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 01 | Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 02 | Belanja Pegawai dari Belanja langsung |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 03 | Belanja Barang dan Jasa |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 04 | Belanja Modal |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 05 | Belanja Bunga |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 06 | Belanja Subsidi |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 07 | Belanja Hibah |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 08 | Belanja Bantuan Sosial |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 09 | Belanja Bagi Hasil |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 10 | Belanja Bantuan Keuangan |
| 6 | 1 | 1 | 04 | 11 | Belanja Tidak Terduga |
| 6 | 1 | 1 | 05 | | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan |
| 6 | 1 | 1 | 05 | 01 | Uang jaminan |
| 6 | 1 | 1 | 05 | 02 | Potongan Taspen |
| 6 | 1 | 1 | 05 | 03 | Potongan Beras |
| 6 | 1 | 1 | 05 | 04 | Askes |
| 6 | 1 | 1 | 05 | 05 | Dst. |
| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
| 1 | | | | | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 6 | 1 | 1 | 06 | | Kegiatan lanjutan |
| 6 | 1 | 1 | 06 | 01 | Kegiatan lanjutan |
| 6 | 1 | 1 | 06 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | | | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 2 | 01 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 2 | 01 | 01 | Pencairan Dana Cadangan nomor |
| 6 | 1 | 2 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 3 | | | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 3 | 01 | | Hasil penjualan perusahaan milik daerah / BUMD |
| 6 | 1 | 3 | 01 | 01 | BUMD |
| 6 | 1 | 3 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 3 | 02 | | Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga |
| 6 | 1 | 3 | 02 | 01 | |
| 6 | 1 | 3 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 4 | | | Penerimaan Pinjaman Daerah |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 4 | 01 | | Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah |
| 6 | 1 | 4 | 01 | 01 | Penerusan pinjaman |
| 6 | 1 | 4 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 4 | 02 | | Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain |
| 6 | 1 | 4 | 02 | 01 | Pemerintah daerah |
| 6 | 1 | 4 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 4 | 03 | | Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank |
| 6 | 1 | 4 | 03 | 01 | Bank |
| 6 | 1 | 4 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 4 | 04 | | Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank |
| 6 | 1 | 4 | 04 | 01 | Lembaga keuangan bukan bank |
| 6 | 1 | 4 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 4 | 05 | | Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah |
| 6 | 1 | 4 | 05 | 01 | Obligasi atas nama |
| 6 | 1 | 4 | 05 | 02 | Obligasi nomor.... |
| 6 | 1 | 4 | 05 | 03 | Dst. |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|--|--|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 6 | 1 | 5 | | | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 6 | 1 | 5 | 01 | | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman |
| 6 | 1 | 5 | 01 | 01 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman |
| 6 | 1 | 5 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 6 | | | Penerimaan Piutang Daerah |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 6 | 01 | | Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah |
| 6 | 1 | 6 | 01 | 01 | Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah |
| 6 | 1 | 6 | 01 | 02 | Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah |
| 6 | 1 | 6 | 01 | 03 | Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 6 | 02 | | Penerimaan piutang daerah dari pemerintah |
| 6 | 1 | 6 | 02 | 01 | Penerimaan piutang daerah dari pemerintah |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 6 | 03 | | Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain |
| 6 | 1 | 6 | 03 | 01 | Pemerintah daerah |
| 6 | 1 | 6 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 6 | 04 | | Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank |
| 6 | 1 | 6 | 04 | 01 | Bank |
| 6 | 1 | 6 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 1 | 6 | 05 | | Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank |
| 6 | 1 | 6 | 05 | 01 | Lembaga keuangan bukan bank |
| 6 | 1 | 6 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | | | | Pengeluaran Pembiayaan Daerah |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | | | Pembentukan Dana Cadangan |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | 01 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 6 | 2 | 1 | 01 | 01 | Pembentukan dana cadangan nomor |
| 6 | 2 | 1 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 2 | | | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 2 | 01 | | Badan usaha milik pemerintah (BUMN) |
| 6 | 2 | 2 | 01 | 01 | BUMN |
| 6 | 2 | 2 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|--|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 02 | | Badan usaha milik daerah (BUMD) |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|---|
| 6 | 2 | 2 | 02 | 01 | BUMD |
| 6 | 2 | 2 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 2 | 03 | | Badan usaha milik swasta |
| 6 | 2 | 2 | 03 | 01 | Badan |
| 6 | 2 | 2 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | | | Pembayaran Pokok Utang |
| 6 | 2 | 3 | 01 | | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah |
| 6 | 2 | 3 | 01 | 01 | Penerusan pinjaman |
| 6 | 2 | 3 | 01 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | 02 | | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain |
| 6 | 2 | 3 | 02 | 01 | Pemerintah daerah |
| 6 | 2 | 3 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | 03 | | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank |
| 6 | 2 | 3 | 03 | 01 | Bank |
| 6 | 2 | 3 | 03 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | 04 | | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank |
| 6 | 2 | 3 | 04 | 01 | Lembaga keuangan bukan bank |
| 6 | 2 | 3 | 04 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | 05 | | Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah |
| 6 | 2 | 3 | 05 | 01 | Penerusan pinjaman |
| 6 | 2 | 3 | 05 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | 06 | | Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain |
| 6 | 2 | 3 | 06 | 01 | Pemerintah daerah |
| 6 | 2 | 3 | 06 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | 07 | | Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank |
| 6 | 2 | 3 | 07 | 01 | Bank |
| 6 | 2 | 3 | 07 | 02 | Dst. |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN |
|---------------|---|---|----|----|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 08 | | Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank |
| 6 | 2 | 3 | 08 | 01 | Lembaga keuangan bukan bank |
| 6 | 2 | 3 | 08 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | 09 | | Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo |

| | | | | | |
|---|---|---|----|----|--|
| 6 | 2 | 3 | 09 | 01 | Obligasi atas nama.... |
| 6 | 2 | 3 | 09 | 02 | Obligasi nomor.... |
| 6 | 2 | 3 | 09 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 3 | 10 | | Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo |
| 6 | 2 | 3 | 10 | 01 | Obligasi atas nama.... |
| 6 | 2 | 3 | 10 | 02 | Obligasi nomor.... |
| 6 | 2 | 3 | 10 | 03 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | | | Pemberian Pinjaman Daerah |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | 01 | | Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah |
| 6 | 2 | 4 | 01 | 01 | Pemerintah |
| | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | 02 | | Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain |
| 6 | 2 | 4 | 02 | 01 | Pemerintah daerah.... |
| 6 | 2 | 4 | 02 | 02 | Dst. |
| | | | | | |
| 6 | 3 | | | | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan |

LAMPIRAN I I.A:
PERATURAN BUPATI
KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS

Halaman ...

| Tanggal | Nomor | | Kode Rekening | Uraian | Ref | Jumlah (Rp) | Akumulasi (Rp) |
|---------|------------------|------------|---------------|--------|-----|-------------|----------------|
| | STS/No ta Kredit | Bukti Lain | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | Jumlah | | | |

....., tanggal.....
PPK-SKPD

tangan)

(tanda

(nama lengkap)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran kas.
2. Kolom 2 diisi dengan nomor SP2D/Nota Debet atau Bukti Pengeluaran Lainnya yang sah.
3. Kolom 3 diisi dengan kode rekening belanja dan/atau pembiayaan-pengeluaran atau kode rekening lainnya (rincian obyek).
4. Kolom 4 diisi dengan uraian nama rekening belanja dan/atau pembiayaan-pengeluaran atau kode rekening lainnya (rincian obyek).
5. Kolom 5 diisi dengan tanda *checklist* disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan pada saat posting ke buku besar.
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pengeluaran kas.
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah akumulasi pengeluaran kas.

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi selain kejadian non kas yang didasarkan pada tanggal nota kredit/nota debet/rekening koran dari bank atau bukti transaksi/kejadian lainnya.
2. Kolom 2 diisi dengan nomor bukti misalnya nomor SPJ, surat perintah pencairan dana (SP2D), surat tanda setoran (STS), atau bukti lainnya yang sah.
3. Kolom 3 diisi dengan kode rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan atau pembiayaan.
4. Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi/kejadian atas aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan atau pembiayaan.
5. Kolom 5 diisi dengan *tick mark* (kode tertentu) yang menyatakan bahwa transaksi/kejadian penerimaan kas, pengeluaran kas atau transaksi selain kas telah di *cross check* dengan buku besar.
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah.
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah.

LAMPIRAN I I.A:
PERATURAN BUPATI
KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BUKU BESAR

SKPD :
 Nama Rekening :
 Kode Rekening :
 Pagu APBD : Rp.
 Pagu Perubahan APBD : Rp.

Halaman ...

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) |
|---------------|--------|-----|---------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

....., tanggal.....

PPK-SKPD
(tanda

tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara Pengisian:

1. SKPD diisi dengan uraian nama SKPD terkait.
2. Nama rekening diisi dengan uraian nama rekening buku besar.
3. Kode rekening diisi dengan kode rekening buku besar.
4. Pagu APBD diisi dengan jumlah rupiah anggaran dalam Perda tentang APBD atas kode rekening buku besar berkenaan.
5. Pagu perubahan APBD diisi dengan jumlah rupiah anggaran dalam Perda tentang Perubahan APBD atas kode rekening buku besar berkenaan.

6. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi atau kejadian selain kas yang didasarkan pada tanggal nota kredit/nota debet/rekening koran dari bank atau bukti transaksi lainnya.
7. Kolom 2 diisi dengan uraian transaksi/kejadian yang terkait dengan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan atau pembiayaan.
8. Kolom 3 diisi dengan *tick mark* (kode tertentu) yang menyatakan bahwa transaksi/kejadian penerimaan kas, pengeluaran kas atau transaksi selain kas telah di *cross check* dengan buku jurnal dan buku besar pembantu.
9. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah sisi debet.
10. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah sisi kredit.
11. Kolom 6 diisi dengan akumulasi jumlah rupiah pengeluaran kas sampai dengan saat tertentu (penghitungan saldo dilakukan setiap periode waktu tertentu harian/mingguan/bulanan/triwulanan/tahunan) sebagai media *cross check* dengan buku jurnal dan buku besar pembantu.

LAMPIRAN I I.A:
PERATURAN BUPATI
KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BUKU BESAR PEMBANTU

SKPD :
 Nama Rekening : (rincian obyek)
 Kode Rekening : (rincian obyek)
 Pagu APBD : Rp.
 Pagu Perubahan APBD : Rp.

Halaman ...

| No | Tanggal | Nomor Bukti | Uraian | Ref | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Saldo (Rp) |
|----|---------|-------------|--------|-----|------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Jumlah | | | | |

....., tanggal.....

PPK-SKPD
 (tanda

tangan)

(nama lengkap)
 NIP.

Cara Pengisian:

- SKPD diisi dengan uraian nama SKPD terkait.
- Nama rekening diisi dengan uraian nama rekening buku besar pembantu.
- Kode rekening diisi dengan kode rekening buku besar pembantu.
- Pagu APBD diisi dengan jumlah rupiah anggaran dalam Perda tentang APBD atas kode rekening buku besar pembantu berkenaan.
- Pagu perubahan APBD diisi dengan jumlah rupiah anggaran dalam Perda tentang Perubahan APBD atas kode rekening buku besar pembantu berkenaan.
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut bukti transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi kejadian selain kas.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal bukti transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi kejadian selain yang didasarkan

pada tanggal nota kredit/nota debet/rekening koran dari bank atau bukti transaksi lainnya yang sah.

8. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti transaksi misalnya nomor STS, SP2D, Nota Debet, Nota Kredit atau bukti lainnya yang sah.
9. Kolom 4 diisi dengan uraian bukti transaksi/kejadian yang terkait dengan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan (rincian obyek).
10. Kolom 5 diisi dengan *tick mark* (kode tertentu) yang menyatakan bahwa bukti transaksi/ kejadian penerimaan kas, pengeluaran kas atau transaksi selain kas telah di *cross check* dengan buku besar.
11. Kolom 6 dan kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah.
12. Kolom 8 diisi dengan akumulasi jumlah rupiah pengeluaran kas sampai dengan saat tertentu (penghitungan saldo dilakukan setiap periode waktu tertentu harian/mingguan/bulanan/triwulanan/tahunan) sebagai media *cross check* dengan buku besar.

LAMPIRAN I I.A: PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

Nomor : Tahun 2012

Tanggal: Mei 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 SKPD
 LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS
 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
 TAHUN ANGGARAN.....

(dalam rupiah)

| No. Urut | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s/d Semester Pertama | Prognosis | Keterangan |
|------------|--|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pendapatan | | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan pajak daerah | | | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan retribusi daerah | | | | | |
| 1.1.3 | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |
| 2 | Belanja | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 2.1 | Belanja Operasi | | | | | |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | | | | | |
| 2.1.2 | Belanja barang | | | | | |

| No. Urut | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s/d Semester Pertama | Prognosis | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Belanja Modal | | | | | |
| 2.2.1 | Belanja tanah | | | | | |
| 2.2.2 | Belanja peralatan dan mesin | | | | | |
| 2.2.3 | Belanja gedung dan bangunan | | | | | |
| 2.2.4 | Belanja jalan, irigasi dan jaringan | | | | | |
| 2.2.5 | Belanja aset tetap lainnya | | | | | |
| 2.2.6 | Belanja aset lainnya | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |
| | Surplus / (Defisit) | | | | | |

....., tanggal.....
 Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

LAMPIRAN I I.A: PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSES
6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN.....

(dalam rupiah)

| No. Urut | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s/d Semester Pertama | Prognosis | Keterangan |
|----------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pendapatan | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | | | | |
| 1.2.1 | Dana Perimbangan | | | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber | | | | | |
| 1.2.1.3 | Daya Alama) | | | | | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | Dana Alokasi Khusus | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | | | | | |
| 1.2.2.2 | Dana Otonomi Khusus | | | | | |
| | Dana Penyesuaian | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Transfer Pemerintah Provinsi | | | | | |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | | | | |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | | |
| No. Urut | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s/d Semester Pertama | Prognosis | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | | | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan hibah | | | | | |
| 1.3.2 | Pendapatan dana darurat | | | | | |
| 1.3.3 | Pendapatan lainnya | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |
| 2 | Belanja | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| 2.1 | Belanja Operasi | | | | | |
| 2.1.1 | Belanja bunga | | | | | |
| 2.1.2 | Belanja subsidi | | | | | |
| 2.1.3 | Belanja hibah | | | | | |
| 2.1.4 | Belanja bantuan sosial | | | | | |
| 2.1.5 | Belanja bantuan keuangan | | | | | |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |
| 2.4 | Transfer | | | | | |
| 2.4.1 | Transfer Bagi Hasil ke Desa | | | | | |
| 2.4.1.1 | Bagi hasil pajak | | | | | |
| 2.4.1.2 | Bagi hasil retribusi | | | | | |
| 2.4.1.3 | Bagi hasil pendapatan lainnya | | | | | |
| | Surplus / (Defisit) | | | | | |
| No. Urut | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s/d Semester Pertama | Prognosis | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Pembiayaan | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| 3.1 | Penerimaan Daerah | | | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan sisa lebih perhitungan | | | | | |
| 3.1.2 | anggaran (SiLPA) | | | | | |
| 3.1.3 | Pencairan dana cadangan | | | | | |
| 3.1.4 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang | | | | | |
| 3.1.5 | dipisahkan | | | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan pinjaman daerah | | | | | |
| | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | | | | | |
| | Penerimaan piutang daerah | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Daerah | | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (investasi) pemerintah | | | | | |
| 3.2.3 | daerah | | | | | |
| 3.2.4 | Pembayaran pokok utang | | | | | |
| | Pemberian pinjaman daerah | | | | | |
| | Jumlah | | | | | |
| | Pembiayaan Neto | | | | | |
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | | | | |

....., tanggal.....
 BUPATI KAPUAS HULU

(tanda tangan)

(nama lengkap)

LAMPIRAN I I.A: PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 SKPD
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
 31 DESEMBER

(dalam rupiah)

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih/ (Kurang) |
|------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pendapatan | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | |
| | Jumlah | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Operasi | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.1.2 | Belanja Barang | | | |

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih/ (Kurang) |
|------------|--------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 2.2 | Belanja Modal | | | |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | | | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | | |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Surplus / (Defisit) | | | |

....., tanggal.....
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

LAMPIRAN I I.A: PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

Nomor : Tahun 2012

Tanggal: Mei 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER

(dalam rupiah)

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih/ (Kurang) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | | |
| 1.2.1 | Dana Perimbangan | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber | | | |
| 1.2.1.3 | Daya Alam) | | | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Umum | | | |
| | Dana Alokasi Khusus | | | |
| 1.2.2 | | | | |
| 1.2.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | | | |
| 1.2.2.2 | Dana Otonomi Khusus | | | |
| | Dana Penyesuaian | | | |
| 1.2.3 | | | | |
| 1.2.3.1 | Transfer Pemerintah Provinsi | | | |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | | |
| | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih/ (Kurang) |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan hibah | | | |
| 1.3.2 | Pendapatan dana darurat | | | |
| 1.3.3 | Pendapatan lainnya | | | |
| | Jumlah | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Operasi | | | |
| 2.1.1 | Belanja bunga | | | |
| 2.1.2 | Belanja subsidi | | | |
| 2.1.3 | Belanja hibah | | | |
| 2.1.4 | Belanja bantuan sosial | | | |
| 2.1.5 | Belanja bantuan keuangan | | | |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | | | |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | | | |
| | Jumlah | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------|-----------|-----------------|
| 2.4 | Transfer | | | |
| 2.4.1 | Transfer Bagi Hasil ke Desa | | | |
| 2.4.1.1 | Bagi hasil pajak | | | |
| 2.4.1.2 | Bagi hasil retribusi | | | |
| 2.4.1.3 | Bagi hasil pendapatan lainnya | | | |
| | Surplus / (Defisit) | | | |
| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih/ (Kurang) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Pembiayaan | | | |
| 3.1 | Penerimaan Daerah | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) | | | |
| 3.1.2 | Pencairan dana cadangan | | | |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan pinjaman daerah | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | | | |
| | Jumlah | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | xxx | xxx | xx | xxx |
| 6 | Dipisahkan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 7 | Lain-lain PAD yang sah | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 8 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 9 | (3 s/d 6) | | | | |
| 10 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 11 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 12 | PERIMBANGAN | xxx | xxx | xx | xxx |
| 13 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xx | xxx |
| 14 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xx | xxx |
| 15 | Dana Alokasi Umum | | | | |
| | Dana Alokasi Khusus | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| | Jumlah Pendapatan Transfer | | | | |
| | Dana Perimbangan | | | | |
| | (11 s/d 14) | | | | |

| NO. | U R A I A N | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 16 | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- | | | | |
| 18 | LAINNYA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 19 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xx | xxx |
| 20 | Dana Penyesuaian | | | | |
| | Jumlah Pendapatan Transfer | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 21 | Pemerintah Pusat- | | | | |
| 22 | Lainnya (18 s/d 19) | | | | |
| 23 | | xxx | xxx | xx | xxx |
| 24 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | xxx | xxx | xx | xxx |
| 25 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 26 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 27 | Jumlah Transfer Pemerintah | | | | |
| 28 | Provinsi (23 s/d 24) | | | | |
| 29 | Total Pendapatan Transfer | xxx | xxx | xx | xxx |
| 30 | (15 + 20 + 25) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 31 | | xxx | xxx | xx | xxx |
| 32 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| | Pendapatan Hibah | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 33 | Pendapatan Dana Darurat | xxxx | xxxx | xx | xxxx |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 34 | Pendapatan Lainnya | | | | |
| 35 | Jumlah Lain-lain Pendapatan | | | | |
| 36 | yang Sah | | | | |
| 37 | (29 s/d 31) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 38 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + | xxx | xxx | xx | xxx |
| 39 | 26 + 32) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 40 | | xxx | xxx | xx | xxx |
| 41 | BELANJA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 42 | BELANJA OPERASI | xxx | xxx | xx | xxx |
| 43 | Belanja Pegawai | xxxx | xxxx | xxx | xxxx |
| | Belanja Barang | | | | |
| | Bunga | | | | |
| | Subsidi | | | | |
| | Hibah | | | | |
| | Bantuan Sosial | | | | |
| | Jumlah Belanja Operasi (37 s/d | | | | |
| | 42) | | | | |

| NO. | U R A I A N | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|---|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 44 | | | | | |
| 45 | BELANJA MODAL | | | | |
| 46 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 47 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xx | xxx |
| 48 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 49 | Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 50 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 51 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 52 | Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|------|----|------|
| 53 | | | | | |
| 54 | BELANJA TAK TERDUGA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 55 | Belanja Tak Terduga | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 56 | Jumlah Belanja Tak Terduga (55 | | | | |
| 57 | s/d 55) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 58 | JUMLAH BELANJA (43 + 52 + | | | | |
| 59 | 56) | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | TRANSFER | xxx | xxx | xx | xxx |
| 62 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 63 | Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xx | xxx |
| 64 | Bagi Hasil Retribusi | | | | |
| | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 65 | JUMLAH TRANSFER/BAGI | | | | |
| 66 | HASIL KE DESA | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 67 | (61 S/D 63) | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | SURPLUS/ DEFISIT (33 - | | | | |
| 70 | 64) | | | | |
| 71 | | xxx | xxx | xx | xxx |
| 72 | PEMBIAYAAN | xxx | xxx | xx | xxx |
| 73 | | xxx | xxx | xx | xxx |
| 74 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | xxx | xxx | xx | xxx |
| | Penggunaan SiLPA | | | | |
| | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | | | | |
| | yang Dipisahkan | | | | |
| | Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah | | | | |
| | Pusat | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------|-----------|--|-----------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Realisasi |
|--|--|----------|-----------|--|-----------|

| NO. | U R A I A N | 20X1 | 20X1 | (%) | 20X0 |
|-----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 75 | Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 76 | Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 77 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 78 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 79 | Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 80 | Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 81 | Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 82 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 83 | Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada | xxxx | xxxx | xx | xxxx |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| 84 | Perusahaan | | | | |
| 85 | Daerah | | | | |
| 86 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada | xxx | xxx | xx | xxx |
| 87 | Pemerintah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 88 | Daerah Lainnya | | | | |
| | Jumlah Penerimaan (71 s/d 82) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 89 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | xxx | xxx | xx | xxx |
| 90 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 91 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam | | | | |
| | Negeri – | xxx | xxx | xx | xxx |
| 92 | Pemerintah Pusat | | | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam | xxx | xxx | xx | xxx |
| 93 | Negeri – | | | | |
| | Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 94 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam | xxx | xxx | xx | xxx |
| | Negeri – | | | | |
| | Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam | | | | |
| | Negeri – | | | | |
| | Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam | | | | |
| | Negeri – | | | | |
| | Obligasi | | | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam | | | | |
| | Negeri – | | | | |
| | Lainnya | | | | |
| | Pemberian Pinjaman kepada | | | | |
| | Perusahaan Negara | | | | |

| NO. | U R A I A N | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|---|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 95 | Pemberian Pinjaman kepada | xxx | xxx | xx | xxx |
| 96 | Perusahaan Daerah | | | | |
| | Pemberian Pinjaman kepada | xxx | xxx | xx | xxx |
| 97 | Pemerintah Daerah | xxxxx | xxxxx | xx | xxxxx |
| 98 | Lainnya | xxxxx | xxxxx | xx | xxxxx |
| 99 | Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96) | | | | |
| 100 | PEMBIAYAAN NETO (83 - 97) | xxxxx | xxxxx | xx | xxxxx |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 98) | | | | |

....., tanggal.....
BUPATI KAPUAS HULU

(tanda tangan)

(nama lengkap)

LAMPIRAN I I.A: PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi : x.xx.xx

(dalam rupiah)

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | | Penjelasan |
|---------------|--------|----------------------------|-----------|-----------------------|---|------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

....., tanggal

NIP.

**LAMPIRAN I I.A: PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012**

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NERACA SKPD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

| U R A I A N | Jumlah | | Kenaikan (Penurunan) | |
|------------------------------|---------|-----------|-------------------------|---|
| | Tahun n | Tahun n-1 | Jumlah | % |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas | | | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | | | |
| Piutang | | | | |
| Piutang Retribusi | | | | |
| Piutang Lain-lain | | | | |
| Persediaan | | | | |
| Jumlah | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| ASET TETAP | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------------------------|---|
| Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen | | | | |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | | |
| Jumlah | | | | |
| U R A I A N | Jumlah | | Kenaikan (Penurunan) | |
| | Tahun n | Tahun n-1 | Jumlah | % |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain | | | | |
| Jumlah | | | | |
| JUMLAH ASET | | | | |
| KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan Utang Jangka Pendek Lainnya | | | | |
| Jumlah | | | | |
| EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan | | | | |
| Jumlah | | | | |
| EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | | | | |
| Jumlah | | | | |
| EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI RK PPKD | | | | |
| Jumlah | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | | | | |

....., TANGGAL

Pengguna

Anggaran

(nama lengkap)
NIP.

**LAMPIRAN I I.A: PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012**

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NERACA SKPKD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

112

| | | |
|--|--------|----------|
| | Jumlah | Kenaikan |
|--|--------|----------|

| U R A I A N | | | (Penurunan) | |
|--|---------|-----------|-------------|---|
| | Tahun n | Tahun n-1 | Jumlah | % |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas | | | | |
| Kas di Kas Daerah | | | | |
| Jumlah | | | | |
| ASET UNTUK DIKONSOLIDASI | | | | |
| RK SKPD | | | | |
| RK SKPD | | | | |
| Jumlah | | | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | |
| Investasi Permanen | | | | |
| Investasi Non Permanen | | | | |
| Jumlah | | | | |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | | | |
| Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | | | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | | | |
| Aset Tak Berwujud | | | | |
| Aset Lain-lain | | | | |
| Jumlah | | | | |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga | | | | |
| Uang Muka dari Kas Daerah | | | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | | | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | | | | |
| Jumlah | | | | |
| EKUITAS DANA | | | | |
| EKUITAS DANA LANCAR | | | | |
| SILPA | | | | |
| Cadangan Piutang | | | | |
| Cadangan Persediaan | | | | |
| Jumlah | | | | |
| EKUITAS DANA INVESTASI | | | | |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap | | | | |
| Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | | | | |
| Jumlah | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| DANA | | | | |
|-------------|--|--|--|--|

....., TANGGAL

(nama lengkap)
NIP.

**LAMPIRAN I I.A: PERATURAN BUPATI KAPUAS
HULU**

114 **Nomor : Tahun 2012**
Tanggal: Mei 2012

Format Neraca sesuai SAP

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | U R A I A N | 20x1 | 20x0 |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 1 | ASET | | |
| 2 | ASET LANCAR | | |
| 3 | Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| 4 | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| 5 | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| 6 | Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| 7 | Piutang Pajak | xxx | xxx |
| 8 | Piutang Retribusi | xxx | xxx |
| 9 | Bagian Lancar Pinjaman kepada | xxx | xxx |
| 10 | Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| 11 | Bagian Lancar Pinjaman kepada | xxx | xxx |
| 12 | Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| 13 | Bagian Lancar Pinjaman kepada | xxx | xxx |
| 14 | Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| 15 | Bagian Lancar Pinjaman kepada | xxx | xxx |
| 16 | Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 17 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan | xxx | xxx |
| 18 | Angsuran | xxx | xxx |
| 19 | Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan | | |
| 20 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 21 | Piutang Lainnya | xxx | xxx |
| 22 | Persediaan | xxx | xxx |
| 23 | Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) | xxx | xxx |
| 24 | INVESTASI JANGKA PANJANG | xxx | xxx |
| 25 | Investasi Nonpermanen | xxx | xxx |
| 26 | Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| 27 | Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| 28 | Pinjaman kepada Pemerintah Daerah | | |
| 28 | Lainnya | xxx | xxx |
| 29 | Investasi dalam Surat Utang Negara | xxx | xxx |
| 30 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | xxx | xxx |
| 31 | Investasi Nonpermanen Lainnya | xxx | xxx |

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 32 | Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26) | | |
| 33 | | xxx | xxx |
| 34 | Investasi Permanen | xxx | xxx |
| 35 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| 36 | Investasi Permanen Lainnya | xxx | xxx |
| 37 | Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30) | xxx | xxx |
| 38 | | xxx | xxx |
| 39 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31) | xxx | xxx |
| 40 | | xxx | xxx |
| 41 | ASET TETAP | | |
| 42 | Tanah | xxx | xxx |
| 43 | Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| 44 | Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan | | |
| | Jumlah Aset Tetap (34 s/d40) | | |
| | DANA CADANGAN | | |
| | Dana Cadangan | | |
| | Jumlah Dana Cadangan (43) | | |

| No. | U R A I A N | 20x1 | 20x0 |
|-----|--|------------|------------|
| 45 | ASET LAINNYA | | |
| 46 | Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| 47 | Tuntutan Perbendaharaan | xxx | xxx |
| 48 | Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 49 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxx | xxx |
| 50 | Aset Tak Berwujud | xxx | xxx |
| 51 | Aset Lain-lain | xxx | xxx |
| 52 | Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51) | xxx | xxx |
| 53 | JUMLAH ASET (18 + 32 + 41) | xxx | xxx |

| | | | |
|----|--------------------------------------|------------|------------|
| 54 | + 44 + 52) | | |
| 55 | | | |
| 56 | KEWAJIBAN | xxx | xxx |
| 57 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | xxx | xxx |
| 58 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | xxx | xxx |
| 59 | Utang Bunga | xxx | xxx |
| 60 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – | xxx | xxx |
| 61 | Pemerintah Pusat | | |
| 62 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – | xxx | xxx |
| 63 | Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 64 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – | xxx | xxx |
| 65 | Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx |
| 66 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – | xxx | xxx |
| 67 | Lembaga Keuangan bukan | | |
| 68 | Bank | | |
| 69 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – | xxx | xxx |
| 70 | Obligasi | xxx | xxx |
| 71 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | xxx | xxx |
| 72 | Lainnya | xxx | xxx |
| 73 | Utang Jangka Pendek Lainnya | xxx | xxx |
| 74 | Jumlah Kewajiban Jangka | xxx | xxx |
| 75 | Pendek (57 s/d 65) | xxx | xxx |
| 76 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | xxx | xxx |
| 77 | Utang Dalam Negeri – Pemerintah | | |
| 78 | Pusat | | |
| 79 | Utang Dalam Negeri – Pemerintah | xxx | xxx |
| 80 | Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 81 | Utang Dalam Negeri – Lembaga | xxx | xxx |
| 82 | Keuangan Bank | xxx | xxx |
| 83 | Utang Dalam Negeri – Lembaga | (xxx) | (xxx) |
| 84 | Keuangan bukan Bank | xxx | xxx |
| 85 | Utang Dalam Negeri – Obligasi | | |
| 86 | Utang Jangka Panjang Lainnya | | |
| 87 | Jumlah Kewajiban Jangka | xxx | xxx |
| 88 | Panjang (68 s/d 73) | xxx | xxx |
| 89 | JUMLAH KEWAJIBAN (66 + | xxx | xxx |
| 90 | 74) | (xxx) | (xxx) |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 87 | | xxx | xxx |
| 88 | EKUITAS DANA | | |
| | EKUITAS DANA LANCAR | | |
| 89 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | | |
| | Pendapatan yang Ditangguhkan | | |
| | Cadangan Piutang | | |
| | Cadangan Persediaan | | |
| | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | | |
| | Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82) | | |
| | EKUITAS DANA INVESTASI | | |
| | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | | |
| | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | | |
| | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | | |
| | Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | | |
| | Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88) | | |

| No. | U R A I A N | 20x1 | 20x0 |
|-----|--|------------|------------|
| 90 | EKUITAS DANA CADANGAN | | |
| 91 | Diinvestasikan dalam Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 92 | Jumlah Ekuitas Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 93 | (91) | xxx | xxx |
| | JUMLAH EKUITAS DANA (83 + 89 + 92) | xxx | xxx |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75 + 93) | | |

(nama lengkap)
NIP.

**LAMPIRAN I I.A: PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN ARUS KAS
untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun n dan Tahun
n-1**

| URAIAN | Tahun n (Rp) | Tahun n-1 (Rp) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
|---------------|-------------------------|---------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
|--|--|--|

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arus Kas Masuk: | | |
|------------------------|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| Pajak Daerah | | |
|--------------|--|--|

| | | |
|------------------|--|--|
| Retribusi Daerah | | |
|------------------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | | |
|--|--|--|

| | | |
|------------|--|--|
| Dipisahkan | | |
|------------|--|--|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang | | |
|---------------------------------------|--|--|

| | | |
|-----|--|--|
| Sah | | |
|-----|--|--|

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Dana Bagi Hasil Pajak | | |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber | | |
|-------------------------------------|--|--|

| | | |
|------------|--|--|
| Daya Alam) | | |
|------------|--|--|

| | | |
|-------------------|--|--|
| Dana Alokasi Umum | | |
|-------------------|--|--|

| | | |
|---------------------|--|--|
| Dana Alokasi Khusus | | |
|---------------------|--|--|

| | | |
|---------------------|--|--|
| Dana Otonomi Khusus | | |
|---------------------|--|--|

| | | |
|------------------|--|--|
| Dana Penyesuaian | | |
|------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | |
|-----------------------------|--|--|

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | |
|-------------------------------|--|--|

| | | |
|-------|--|--|
| Hibah | | |
|-------|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| Dana Darurat | | |
|--------------|--|--|

| | | |
|--------------------|--|--|
| Pendapatan lainnya | | |
|--------------------|--|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| Jumlah | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Arus Kas Keluar: | | |
|-------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------|--|--|
| Belanja Pegawai | | |
|-----------------|--|--|

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Belanja Barang dan Jasa | | |
|-------------------------|--|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| Belanja Bunga | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|-----------------|--|--|
| Belanja Subsidi | | |
|-----------------|--|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| Belanja Hibah | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|------------------------|--|--|
| Belanja Bantuan Sosial | | |
|------------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Belanja Bantuan Keuangan | | |
|--------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Belanja Tidak Terduga | | |
|-----------------------|--|--|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Belanja Bagi Hasil ke Desa | | |
|----------------------------|--|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| Jumlah | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------|--|--|
| ASET NON KEUANGAN | | |
|--------------------------|--|--|

| | | |
|------------------------|--|--|
| Arus Kas Masuk: | | |
|------------------------|--|--|

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Pendapatan Penjualan atas Tanah | | |
|---------------------------------|--|--|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Pendapatan Penjualan atas Peralatan | | |
|-------------------------------------|--|--|

| | | |
|-----------|--|--|
| dan Mesin | | |
|-----------|--|--|

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Pendapatan Penjualan atas Gedung dan | | |
|--------------------------------------|--|--|

| | | |
|----------|--|--|
| Bangunan | | |
|----------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|--|--|
| dan Jaringan | | |
|--------------|--|--|

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap | | |
|--------------------------------------|--|--|

| | | |
|---------|--|--|
| Lainnya | | |
|---------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| Jumlah | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Arus Kas Keluar: | | |
|-------------------------|--|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| Belanja Tanah | | |
|---------------|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Belanja Peralatan dan Mesin | | |
|-----------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Belanja Gedung dan Bangunan | | |
|-----------------------------|--|--|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |
|-------------------------------------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya</p> <p style="text-align: right;">Jumlah</p> <p><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i></p> <p>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</p> <p>Arus Kas Masuk:</p> <p> Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaan Kembali Pinjaman Penerimaan Piutang</p> <p style="text-align: right;">Jumlah</p> <p>Arus Kas Keluar:</p> <p> Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi Pemberian Pinjaman</p> <p style="text-align: right;">Jumlah</p> <p><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i></p> <p>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NONANGGARAN</p> <p>Arus Kas Masuk:</p> <p> Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga</p> <p style="text-align: right;">Jumlah</p> <p>Arus Kas Keluar:</p> <p> Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga</p> <p style="text-align: right;">Jumlah</p> <p><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</i></p> <p>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</p> <p>Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas</p> | | |
|--|--|--|

....., TANGGAL

(nama lengkap)
NIP.

**LAMPIRAN I I.A: PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012**

Format Laporan Arus Kas sesuai SAP
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai

175

HULU

Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

| No. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|------|------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| 2 | Arus Masuk Kas: | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | | |
| 6 | Dipisahkan | xxx | xxx |
| 7 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | xxx |
| 8 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx |
| 9 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx |
| 10 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx |
| 11 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx |
| 12 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx |
| 13 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx |
| 14 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx |
| 15 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx |
| 16 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx |
| 17 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx |
| 18 | Pendapatan lainnya | xxx | xxx |
| 19 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17) | | |
| 20 | | xxx | xxx |
| 21 | Arus Keluar Kas: | xxx | xxx |
| 22 | Belanja Pegawai | xxx | xxx |
| 23 | Belanja Barang | xxx | xxx |
| 24 | Bunga | xxx | xxx |
| 25 | Subsidi | xxx | xxx |
| 26 | Hibah | xxx | xxx |
| 27 | Bantuan Sosial | xxx | xxx |
| 28 | Belanja Tidak Terduga | xxx | xxx |
| 29 | Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx |
| 30 | Bagi Hasil Retribusi | xxx | xxx |
| 31 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx |

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 32 | Jumlah Arus Keluar Kas (20 | | |
| 33 | s/d 29) | | |
| 34 | Arus Kas Bersih dari | xxx | xxx |
| 35 | Aktivitas Operasi (18 – 30) | xxx | xxx |
| 36 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset | xxx | xxx |
| 37 | Non Keuangan | xxx | xxx |
| 38 | Arus Masuk Kas: | xxx | xxx |
| 39 | Pendapatan Penjualan atas Tanah | xxx | xxx |
| 40 | Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | |
| | Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | |
| | Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |
| | Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya | | |
| | Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya | | |
| | Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39) | | |

| No. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|
| 41 | Arus Keluar Kas: | | |
| 42 | Belanja Tanah | xxx | xxx |
| 43 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| 44 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| 45 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx |
| 46 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| 47 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx |
| 48 | Jumlah Arus Keluar Kas (34 | xxx | xxx |
| 49 | s/d 39) | xxx | xxx |

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (40 – 48) | | |
| 50 | | | |
| 51 | | xxx | xxx |
| 52 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan | xxx | xxx |
| 53 | Arus Masuk Kas: | xxx | xxx |
| 54 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 55 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | xxx | xxx |
| 56 | yang Dipisahkan | xxx | xxx |
| 57 | Pinjaman Dalam Negeri – | xxx | xxx |
| 58 | Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| 59 | Pinjaman Dalam Negeri – | xxx | xxx |
| 60 | Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 61 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga | | |
| 62 | Keuangan Bank | xxx | xxx |
| | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga | xxx | xxx |
| 63 | Keuangan Bukan Bank | | |
| | Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | | |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | xxx | xxx |
| 65 | Penerimaan Kembali Pinjaman | xxx | xxx |
| 66 | kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| 67 | Penerimaan Kembali Pinjaman | | |
| 68 | kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| | Penerimaan Kembali Pinjaman | | |
| 69 | kepada Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| | Lainnya | | |
| 70 | Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62) | xxx | xxx |
| 71 | | xxx | xxx |
| 72 | Arus Keluar Kas: | xxx | xxx |
| 73 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 74 | Penyertaan Modal Pemerintah | xxx | xxx |
| 75 | Daerah | xxx | xxx |
| 76 | Pembayaran Pokok Pinjaman | xxx | xxx |
| 77 | Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman | | |
| 78 | Dalam Negeri – Pemerintah Daerah | | |
| 79 | Lainnya | xxx | xxx |
| 80 | Pembayaran Pokok Pinjaman | xxx | xxx |
| 81 | Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman | | |
| 82 | Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan | xxx | xxx |
| 83 | Bank | | |
| | | xxx | xxx |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 84 | Pembayaran Pokok Pinjaman | xxx | xxx |
| 85 | Dalam Negeri – Obligasi | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman | | |
| | Dalam Negeri – Lainnya | | |
| | Pemberian Pinjaman kepada | | |
| | Perusahaan Negara | | |
| | Pemberian Pinjaman kepada | | |
| | Perusahaan Daerah | | |
| | Pemberian Pinjaman kepada | | |
| | Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| | Jumlah Arus Keluar Kas (65 | | |
| | s/d 75) | | |
| | Arus Kas Bersih dari | | |
| | Aktivitas Pembiayaan (63 – 76) | | |
| | Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran | | |
| | Arus Masuk Kas | | |
| | Penerimaan Perhitungan Fihak | | |
| | Ketiga (PFK) | | |
| | Jumlah Arus Masuk Kas (80 | | |
| | s/d 80) | | |
| | Arus Keluar Kas | | |
| | Pengeluaran Perhitungan Fihak | | |
| | Ketiga (PFK) | | |
| | Jumlah Arus Keluar Kas (83 | | |
| | s/d 83) | | |
| | Arus Kas Bersih dari | | |
| | Aktivitas Nonanggaran (81 – 84) | | |

| No. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|
| 86 | Kenaikan/Penurunan Kas | xxx | xxx |
| 87 | (31 + 49 +77 + 85) | xxx | xxx |
| 88 | Saldo Awal Kas di BUD | xxx | xxx |
| 89 | Saldo Akhir Kas di BUD (86 | xxx | xxx |
| 90 | + 87) | xxx | xxx |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 91 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90) | xxx | xxx |
|----|--|------------|------------|

....., TANGGAL

(nama lengkap)
NIP.

**LAMPIRAN I I.A: PERATURAN
BUPATI KAPUAS HULU
Nomor : Tahun 2012
Tanggal: Mei 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 180
CATATAN ATAS LAPORAN
SKPD.....**

**HULU
KEUANGAN**

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- Ekonomi makro
- Kebijakan keuangan
- Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Aset
 - 5.1.4 Kewajiban
 - 5.1.5 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup

Tanggal: Mei 2012

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PPKD.....**

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD

Ekonomi makro

Kebijakan keuangan

Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah PPKD

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD

- 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan PPKD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya¹⁸² untuk entitas akuntansi / menggunakan basis akrual dengan penerapan basis kas, entitas pelaporan yang pada PPKD

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan PPKD

Bab VII Penutup

PENJELASAN ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.

Kebijakan keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi neraca dan laporan arus kas. 183

Pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeure).

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam bab II angka 2.3. yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan/atau diagram.

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud harus dengan jelas menggambarkan nilai perolehan historis, yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

4.4 Penerapan kebijakan ketentuan yang ada dalam pemerintah

akuntansi berkaitan dengan standar akuntansi

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Contoh:

Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan:

- Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan.

Belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan:

- Aset tetap belum dilakukan penyusutan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan yang terdiri atas:

- d. Pendapatan asli daerah
- e. Dana perimbangan
- f. Lain-lain pendapatan yang sah

5.1.2 Belanja

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang
- c. Belanja modal
- d. Belanja bunga (khusus untuk SKPKD)
- e. Belanja subsidi (khusus untuk SKPKD)
- f. Belanja hibah (khusus untuk SKPKD)
- g. Belanja bantuan sosial (khusus untuk SKPKD)
- h. Belanja bagi hasil (khusus untuk SKPKD)
- i. Belanja bantuan keuangan (khusus untuk SKPKD)
- j. Belanja tidak terduga (khusus untuk SKPKD)

5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan yang terdiri atas:

a. Pembiayaan Penerimaan:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)
- 2) Pencairan dana cadangan
- 3) Hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang dipisahkan
- 4) Penerimaan pinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah
- 5) Penerimaan kembali pinjaman daerah
- 6) Penerimaan piutang

b. Pembiayaan

- 1) Pembentukan dana
- 2) Pembayaran pokok

Pengeluaran:

- cadangan
- utang

- 3) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 4) Pemberian pinjaman

5.1.4 Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset yang terdiri atas:

- a. Aset lancar
- b. Investasi jangka panjang (khusus untuk SKPKD)
- c. Aset tetap
- d. Dana cadangan (khusus untuk SKPKD)
- e. Aset lain-lain

5.1.5 Kewajiban

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos kewajiban yang terdiri atas:

- a. Kewajiban jangka pendek
- b. Kewajiban jangka panjang (khusus untuk SKPKD)

5.1.6 Ekuitas dana

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana yang terdiri atas:

- a. Ekuitas dana lancar
- b. Ekuitas dana investasi (khusus untuk SKPKD)
- c. Ekuitas dana cadangan (khusus untuk SKPKD)

5.1.7 Komponen-komponen laporan arus kas, yang terdiri atas:

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana yang terdiri atas:

- a. Arus kas aktivitas operasi
- b. Arus kas aktivitas investasi aset nonkeuangan
- c. Arus kas aktivitas pembiayaan
- d. Arus kas aktivitas nonanggaran

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan¹⁸⁶dengan laporan realisasi anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang

disusun berdasarkan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
- e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
- f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca.
- g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.
- h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.